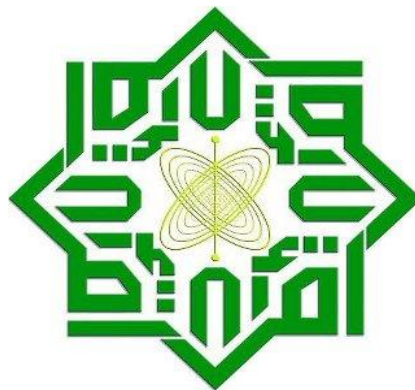


SKRIPSI

PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DIKECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

RIMA DONA FITRI
10875004385

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2012

ABSTRAK

PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK

Oleh:

RIMA DONA FITRI

NIM. 10875004385

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Adapun permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu dikarenakan adanya indikasi bahwa pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa belum optimal seperti yang diharapkan, seperti masih banyaknya monografi desa yang kosong, struktur desa yang tidak terisi dan buku-buku administrasi pemerintahan desa yang juga belum teisi dengan jelas, disebabkan karena masih rendahnya bimbingan, supervise, konsultasi, pemberian pedoman, fasilitasi yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuisioner dan wawancara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 51 orang yang terdiri dari pegawai kantor camat dan aparat desa. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis yang berupaya memberikan gambaran-gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan kemudian data dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian atau tabel kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, peranan camat dalam membina administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yaitu melalui bimbingan, supervise, konsultasi, pemberian pedoman dan fasilitasi. Dari hasil pengukuran dari masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa peranan camat dalam membina administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dapat dinyatakan dalam kategori cukup baik.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang Masalah	1
1. 2. Perumusan Masalah	11
1. 3. Tujuan Penelitian	11
1. 4. Mamfaat Penelitian	13
1. 5. Sistematika Penelitian	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2. 1. Peranan	14
2. 2. Otonomi Daerah	17
2. 3. Pemerintahan	18
2. 4. Kecamatan	20
2. 5. Pembinaan.....	23
2. 6. Administrasi Pemerintahan Desa	26
2. 7. Pandangan Islam Mengenai Administrasi Pemerintahan	28
2. 8. Kerangka Pemikiran	30
2. 9. Konsep Operasional	31
2.10. Teknik Pengukuran	34

2.11. Hipotesis	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3. 1. Jenis Penelitian	39
3. 2. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3. 3. Populasi dan Sampel.....	39
3. 4. Jenis dan Sumber Data.....	41
3. 5. Teknik Pengumpulan Data	42
3. 6. Teknik Analisa Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4. 1. Sejarah Singkat Kecamatan	43
4. 2. Geografis Kecamatan Mempura	43
4. 3. Demografi Kecamatan Mempura	45
4. 4. Uraian Tugas pokok dan Fungsi Susunan Organisasi	50
4.5. Uraian Tugas Pemerintahan Desa.....	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5. 1. Identitas Responden	62
5. 2. Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura	65
a. Bimbingan	67
b. Supervisi	74
c. Konsultasi	81
d. Pemberian Pedoman	86
e. Fasilitasi	92
5. 3. Rekapitulasi Jawaban Responden	99

BAB VI PENUTUP

6. 1. Kesimpulan	105
6. 2. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana tentram lahir dan batin serta dinamis. Dengan melihat hal tersebut, jelaslah bahwa pembangunan nasional merupakan perimbangan kewajiban antara pemerintah dan rakyat secara keseluruhan, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pembangunan dan masyarakat berkewajiban untuk menunjang dan berperan secara aktif dalam setiap gerak langkah pembangunan.

Perlu diingat bahwa Administrasi Negara itu menyelenggarakan dan melaksanakan kebijaksanaan publik yang telah dibuat oleh lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi Negara, yang pada dasarnya administrasi Negara adalah penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang dan kesempatan bagi desa dalam memperdayakan desa dan masyarakatnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pelayanan yang optimal, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut pemberian otonomi diarahkan untuk:

1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan dan pembangunan otonomi daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan-kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang di daerah khususnya maupun nasional pada umumnya.

Menurut Johan Galtung (dalam Trijono ;2007) Pembangunan merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Pembangunan juga dapat dilihat sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa.

Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi

kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Untuk melihat sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari bupati kepada camat dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 126 ayat (1) yang dijelaskan bahwa: Kecamatan dipimpin oleh camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dan selanjutnya dalam Pasal 126 ayat (3) huruf F menyatakan bahwa Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

PP No. 19 Tahun 2008 Pasal 21 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan Kepala Desa.

- b. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan Kepala Desa.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala Desa.
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan.
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada bupati atau wali kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, (Pasal 3) huruf f juga menyatakan bahwa: Camat membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 98 ayat (2), menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan yang berbunyi: “Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan Desa”.

Pada Pasal 102 dijelaskan bahwa: pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), meliputi, (a) memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, (b) memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, (c) memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa, (d) memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa, (e) memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, (f) memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, (g) memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, (h) memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Desa, (i) memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, (j) memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga, (k) memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, (l) memfasilitasi dengan pihak ketiga, (m) memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Desa, dan (n) memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Desa.

Dalam pasal 1 ayat 15 PP No. 72 tahun 2005 menyatakan bahwa Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,

supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fasilitasi yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui Pemberian Pedoman, Bimbingan, Pelatihan, Arahan, dan Supervisi (Kansil, 2004;119).

Secara garis besar tugas pembinaan Camat terhadap pemerintah desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 09 tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, (Pasal 70) Menyatakan bahwa:

“Terhadap kepala desa yang telah dilantik, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa yang telah dilantik, dengan memberikan pembekalan mengenai tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa, serta hal-hak lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dengan corak dan intensitas dan prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapabilitas aparatur dan ketersediaan sumber daya.

Dalam hal ini perlu diadakannya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pimpinan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diemban kepadanya guna terwujudnya tujuan otonomi desa. Pada umumnya keberhasilan dari pelaksanaan otonomi desa sangat tergantung kepada kemampuan aparatur pemerintah desa dan pemerintahan yang berada di atasnya.

Pembinaan merupakan perbaikan atas sesuatu, melalui pembinaan diharapkan pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang berhadapan Langsung dengan masyarakat diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal dan berkualitas kepada masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan yang efektif yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam PP No. 19 Tahun 2008 (Pasal 21) huruf b Tentang Kecamatan Pembinaan juga dapat dilakukan melalui : Bimbingan, Supervisi, Fasilitasi dan Konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan Kepala Desa.

Pentingnya dilakukan pembinaan administrasi desa dikarenakan administrasi adalah kelengkapan dari suatu organisasi pemerintahan, karena tanpa adanya administrasi tidak memungkinkan suatu kegiatan organisasi dapat dilaksanakan. Administrasi pemerintahan desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai tujuannya itu pemerintahan desa yang mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Wijaya, 2002:88).

Kurangnya pembinaan berpengaruh pada pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, karena kurangnya pembinaan yang diberikan, para aparat desa tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Akan tetapi hal tersebut dapat ditanggulangi apabila aparat desa memiliki Sumber pembinaan yang cukup dari kecamatan dalam menjalani pemerintahan di desa. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Mengingat angka pertumbuhan penduduk dikecamatan Mempura yang yang tergolong cukup besar dan semakin berkembang maka perlu adanya pembinaan yang menjurus yang diberikan kecamatan kepada pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan taraf hidup masyarakat. Dapat dilihat dari tabel I.1. dibawah ini mengenai jumlah penduduk di Kecamatan Mempura.

Tabel I.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun 2011

No	Desa	Jumlah						
		Dusun	RT	RW	KK	Jiwa		
						L	P	JML
1.	Koto Ringin	2	7	4	309	610	565	1175
2.	Paluh	3	8	3	333	698	672	1370
3.	Benteng Hilir	2	8	4	369	748	705	1453
4.	Benteng Hulu	3	12	4	636	1285	1233	2518
5.	Kp.Tengah	1	1	1	93	180	175	355
6.	Sei. Mempura	4	14	5	903	2075	1938	4013
7.	Merempan Hilir	2	7	3	415	839	738	1577
8.	Teluk Merempan	2	6	2	147	281	274	555
		17	57	24	3205	6716	6300	13016

Sumber Data: Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak 2011

Berdasarkan uraian-uraian diatas tugas umum pemerintah kecamatan tersebut dapat dilihat bahwa tugas camat sebagai pemimpin kecamatan sangat kompleks dan beragam. Peranan Camat sebagai Pembina Administrasi Desa

sangat penting dalam memacu perkembangan desa. Lambatnya perkembangan Desa dapat dilihat dari belum tertibnya pengelolaan administrasi Desa. Administrasi Desa sebagai alat penggerak pemerintahan Desa sangat menentukan pengelolaan pemerintahan desa. Administrasi Desa meliputi :

1. Administrasi Umum yang terdiri dari: Buku Keputusan Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, Buku Kekayaan Desa, Buku Agenda, Buku Ekspedisi, Buku Aparat Desa, dan buku Tanah Desa.
2. Administrasi Kependudukan meliputi: Buku penduduk, Buku Penduduk sementara, Buku perkembangan penduduk, Buku kartu keluarga, Buku tanda penduduk, Buku jumlah penduduk.
3. Administrasi Keuangan Desa meliputi: Buku anggaran Desa, buku Kas umum, Buku Kas pembantu (Wijaya, 2002;89).

Administrasi ini sangat vital karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang mana berhadapan langsung dengan masyarakat dan segala urusan surat menyurat, tanah, sistem prosedur, ktp, jual beli dilaksanakan di pemerintahan desa maka perlunya penataan administrasi di pemerintahan desa dikarenakan data yang ada tidak hanya berguna bagi pembangunan desa tetapi sebagai tolak ukur bagi pembangunan bangsa karena pembangunan desa merupakan integral dari pembangunan bangsa.

Fenomena yang terlihat pada saat ini tidak tertatanya Administrasi Pemerintahan Desa, masih banyak buku registrasi desa yang belum terisi, struktur desa yang tidak terisi dan monografi desa yang kosong. padahal buku dan informasi tersebut tidak saja berguna bagi pembangunan desa tetapi juga bagi pembangunan daerah dan nasional, disamping itu hal tersebut menunjukkan tertibnya penataan administrasi di Pemerintahan Desa.

Perlunya pembinaan terhadap penataan tertibnya administrasi desa diharapkan dengan pembinaan bisa menjamin tugas-tugas pemerintah dan

pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja, terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat Pancasila, UUD 1945 dan Negara, terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi, pemanfaatan pegawai sehingga dengan pembinaan bisa memiliki prestasi kerja yang bagus dan yang mana pada akhirnya bisa mencapai dari tujuan otonomi tersebut.

Bedasarkan Wawancara dengan Kepala Desa Benteng Hilir “Camat melakukan pengawasan ke desa dalam penertiban administrasi masih jarang, terkadang memang tidak ada kunjungan sama sekali dalam waktu yang panjang dalam rangka pengawasan terhadap kinerja aparatur desa. Dan masih kurangnya komunikasi antara kepala desa dan camat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa”. Padahal komunikasi dan pengawasan langsung sangat menentukan bagi peningkatan pembangunan desa, dengan komunikasi dan pengawasan langsung camat bisa mengetahui perkembangan-perkembangan tugas kepala desa.

Pentingnya dilakukan pembinaan terhadap administrasi desa dikarenakan administrasi adalah kelengkapan dari organisasi pemerintahan, tanpa adanya administrasi tidak memungkinkan kegiatan organisasi dapat dilaksanakan. Dan pentingnya penertiban administrasi desa karena proses administrasi adalah data-data suatu organisasi didapat dengan jelas, yang mana desa merupakan ujung tombak pemerintahan sehingga data yang terkandung didalamnya sangat berguna tidak hanya bagi pembangunan desa tetapi bagi pembangunan bangsa.

Adapun sejauh ini bentuk pelatihan yang diberikan dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan terutama Kepala Desa. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I.2.Kegiatan Pelatihan dalam rangka Pembinaan yang diikuti oleh Aparatur Pemerintah Desa.

N O	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Pembina	Ket
1.	Th. 2008	Pelatihan tata cara pelaksanaan APB Desa dan SPJ ABB desa	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	Sudah
2.	Th.2009	Pelatihan manajemen bagi Kaur. Pem desa.	Kaur. Pem	Camat dan instansi terkait	Sudah
		Pelatihan pemerintah desa dalam bidang pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa, Sekdes	Camat dan instansi terkait	Sudah
3.	Th.2010	-	-	-	Belum
4.	Th. 2011	Pelatihan fasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha kecil makro dan menengah	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	Sudah

Sumber Data: Kecamatan Mempura Kabupaten Siak 2011

Dari keterangan dan table diatas terlihat adanya fenomena yang mendukung diadakannya penelitian yaitu :

1. Belum tertibnya pengelolaan administrasi Desa dapat dilihat bahwa masih banyaknya buku-buku administrasi desa, monografi desa yang belum terisi jelas, padahal buku tersebut tidak saja berguna bagi pembangunan desa tetapi juga bagi pembangunan daerah dan nasional.

2. Dan adanya indikasi bahwa pihak kecamatan disini melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja aparatur desa dalam penertiban administrasi desa masih jarang terkandang waktu yang panjang memang tidak ada pengawasan langsung sama sekali.

3. Adanya indikasi Belum optimalnya Pelatihan yang diberikan kepada apatar desa dalam rangka pembinaan dalam melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa dan belum menjurusnya pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan tertib administrasi desa.

Berdasarkan persoalan yang ditemui, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil judul penelitian ini, yaitu : **“Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”**.

I.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka dirumuskan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian, yaitu: “Bagaimana Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”.

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pikiran bagi penulis dalam hal Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan bagi Kantor Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis susun ke dalam enam bab dan masing-masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan, pada akhir bab ini akan diuraikan juga kerangka

pemikiran, konsep operasional dan operasional variable penelitian, teknik pengukuran dan hipotesis.

Bab III: Metodologi Penelitian.

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab ini akan dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, demografi, struktur organisasi dan uraian tugas sub-sub bagian.

Bab V : Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

Bab VI: Penutup.

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Peranan

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya Soekanto(2001:268).

Menurut Soekanto (2001: 269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat sosial.

Menurut Ndraha peranan (1987: 53) diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator disetiap jenjang pemerintah.

Selanjutnya Susanto (dalam Soekanto 2001: 94) bahwa: “Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun biasa disebut status objektif”.

Levi (dalam Soekanto 2001: 272) pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut hendaknya diletakkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu untuk melaksanakan.
- c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Kusnadi (2005;358) ada 3 peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi, yaitu:

1. Peran pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peranan yang berbeda, yaitu:
 - a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi.
 - b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawai bekerja secara produktif, efektif, dan efisien dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
2. Peranan berkaitan dengan informasi (*Informasi Role*) dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal yaitu:
 - a. Memantau secara terus menerus, memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
 - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruh organisasi.
 - c. Sebagai juru bicara.

3. Peran Keputusan (Decision Role), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya, dan juru runding.

Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seorang camat mempunyai peran dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai pimpinan harus mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan diambil dalam membina penyelenggaraan pemerintah desa tersebut.

Dalam menjalankan peranannya sebagai Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa camat juga harus membangun komunikasi yang baik terhadap pemerintahan desa agar pemerintah desa bisa berkonsultasi jika ada kesulitan-kesulitan kerja. Rongers 1981 (dalam Cangara; 2007) mengatakan bahwa Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

Harold D. Lasswell (dalam Cangara; 2007) salah seorang peletak dasar ilmu komunikasi lewat ilmu politik menyebutkan tiga fungsi dasar yang menjadi penyebab, mengapa manusia perlu berkomunikasi:

1. Hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya.
2. Upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya.
3. Upaya untuk melakukan transformasi warisan sosial.

Ketiga fungsi diatas menjadi patokan dasar bagi setiap individu dalam berhubungan dengan sesama anggota masyarakat.

Jadi Komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendek kata, sekarang ini keberhasilan dan kegagalan orang dalam mencapai sesuatu yang diinginkan termasuk karir mereka, banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam berkomunikasi.

Begitu juga dengan halnya dalam proses pembinaan, timbulnya proses tersebut karena pihak Pembina berusaha untuk mengadakan hubungan atau komunikasi dengan yang dibina, dalam hal ini adalah pemerintah Kecamatan Mempura, keberhasilan pembinaan tersebut sangat ditentukan oleh hasil dari komunikasi itu sendiri.

2.2. Otonomi daerah

Menurut Widjaja (2002;76) Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersifat operasional dalam

rangka sistem Birokrasi pemerintahan. Yang mana tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparatur pemerintah pusat termasuk sumber daya manusia dalam tugasnya sebagai perumus kebijaksanaan nasional.

Menurut Riwu Kaho (2005:1) faktor pertama yang menentukan prospek otonomi daerah adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini mencakup unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, aparat daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas Pemerintahan Daerah diselenggarakan.

2.3. Pemerintahan

Pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perundang-undangan Negara. Sedangkan Pemerintahan dalam arti sempit adalah meliputi seluruh kegiatan atau fungsi pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yaitu presiden beserta jajarannya mulai dari menteri sampai tukang sapu kantor-kantor, mulai dari menteri sampai dengan juru penerang, mulai dari menteri sampai kepala desa (Salam, 2004;35).

Menurut Iver (dalam Syafie, 2005;22) pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta sebagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

Ndraha (2003;6) mendefenisikan pemerintahan adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Negara.

Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Widjaja (2005;140).

Pemerintahan daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas tersebut antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Keberhasilan pencapaian tujuan Negara ini akan sangat ditentukan oleh “semangat para penyelenggara Negara”.

Salam (2004;164) menyebutkan bahwa manajemen pemerintahan Indonesia itu di desa dibentuk pemerintahan desa dan badan perwakilan desa yang disebut juga pemerintahan. Pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

2.4. Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005;133).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah pasal 126 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi :

1. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan,
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kepala Desa,
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau Kepala Desa.

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak, Kedudukan Pemerintah Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana yang menangani sebagian urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Yang mana camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati.

PP No. 19 Tahun 2008 Pasal 21 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan Kepala Desa.
- b. Memberi Bimbingan, Supervisi, Fasilitasi dan Konsultasi pelaksanaan Administrasi desa dan Kepala Desa.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala Desa.
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan.
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada bupati atau walikota.

Dalam pasal 1 ayat 15 PP No. 72 tahun 2005 Tentang Desa menyatakan bahwa Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Kansil (2004;119) Fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui Pemberian Pedoman, Bimbingan, Pelatihan, Arahan, dan Supervisi.

Sebagai unsur pelaksana, aparatur pemerintah daerah menduduki posisi vital dalam keseluruhan proses penyelenggaraan Otonomi daerah. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparturnya.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten/Kota bukan sebagai

kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.5. Pembinaan

Menurut Ismail (2001; 154). Mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima/pekerja dan penerima akhir (masyarakat). Dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik sejahtera dan sempurna.

Selanjutnya Saydam (2000; 408) pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini berarti pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan inovasi-inovasi suatu kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan.

Ismail (2001; 167-168) Menyatakan bahwa tata cara membina adalah;

1. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relatif rendah. dalam menggunakan media cetak hendaklah sesuai dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dapat mudah dipahami oleh penerima baik menafsirkan, menterjemah, dan menganalisis.
2. Dengan melakukan kunjungan. Yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang keorang lain dengan mengadakan kunjungan.
3. Dengan melakukan petunjuk/demonsrasi. Petunjuk atau demonsrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang tersusun yang dilakukan oleh seseorang

instruktur tentang sesuatu hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.

4. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan popular yang tujuannya khusus memberikan penerangan.
5. Kursus. Merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal. Tujuan pembinaan kursus adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada bidang-bidang tertentu dalam bidang pembangunan perdesaan dan mempertinggi tingkat kematangan dan tingkat pendidikan.

Lebih lanjut wicaksono (2006; 223) menyatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagai mana mestinya.

Tujuan pembinaan menurut Nurholis (2005;133) adalah;

- a. Diarahkan untuk menjamin tugas-tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja.
- c. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pancasila, UUD 1945 dan Negara.
- d. Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi.
- e. Diarahkan pada penyaluran penyebaran dan pemanfaatan pegawai.
- f. Diarahkan kepada pembimbing sistem karir dan pembinaan prestasi kerja.

Miftah juga menjelaskan salah satu teknik perilaku organisasi yang diperluka untuk melakukan perubahan adalah pembinaan organisasi atau dikenal dalam literatur Pembinaan menurut Thoha (2003;182) adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Ada dua unsur dari pengertian

ini, yakni pertama, pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan kedua, pembinaan kepada perbaikan atas sesuatu.

Dengan demikian, pembinaan organisasi bermaksud untuk mengembangkan individu-individu, kelompok, dan atau seluruh sistem dalam organisasi secara keseluruhan. Itulah sebabnya usaha ini merupakan bagian dari ilmu perilaku organisasi.

Menurut Thoha (2003:182) pembinaan organisasi adalah suatu usaha yang berencana yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan dikelola dari pucuk pimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang berencana didalam proses organisasi dengan mempergunakan ilmu perilaku.

kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan organisasi yang dilakukan menyangkut dua hal pokok yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal pokok tersebut adalah menyangkut pengembangan dan pelembagaan organisasi sehingga dapat berjalan optimal serta kegiatan pengarahan organisasi dalam menjalankan usaha organisasi. Pembinaan yang baik diperlukan adanya usaha koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan tindakan perencanaan, bimbingan dan pengendalian/pengawasan.

Sementara itu untuk terlaksananya suatu pembinaan maka Ndraha (2001 : 168) mengatakan melalui : (a) Pendidikan (b) Latihan (penataran, upreading, kursus, dan sebagainya) (c) Lokakarya (workshop) (d) Bimbingan lapangan (penyuluhan, laboratorium dan sebagainya) (e) Penerangan (f) Pertemuan, diskusi, musyawarah (g) Pers, radio dan TV (h) Literatur dan sebagainya (i) Intruksi-intruksi (j) Teladan.

Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu dipakai untuk memacu pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini tentu disebabkan karena pembinaan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pembangunan senemrata pembangunan akan berhasil apabila masyarakat tahu dan mengerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagian penggerak pembangunan. Karena itu peran pemerintah dalam hal ini amat diharapkan melakukan berbagai pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dilingkungan kerjanya.

2.6. Administrasi Pemerintahan Desa

Menurut Widjaja (2002;19) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan Pemerintahan sendiri/otonom.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintah Desa yaitu

Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lainnya.

Menurut pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai kewenangan :
 - a. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - d. Membina kehidupan masyarakat desa
 - e. Membina perekonomian desa
 - f. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - g. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - h. Dan melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Pentingnya pembinaan dalam hal ini adalah pembinaan administrasi desa dikarenakan tanpa administrasi tidak mungkin suatu kegiatan organisasi dapat dilaksanakan.

Dalam pengertian sempit Administrasi desa adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tulis-menulis, surat-menyurat, beserta penyimpanan, pengurusan naskah dan segala pencatatanya yang dilaksanakan oleh aparat atau perangkat desa dalam rangka mencapai tujuan.

Administrasi pemerintahan desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepala desa untuk mencapai tujuannya itu pemerintah desa mampu mengerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Widjaja, 2002;88).

Administrasi Desa sebagai alat penggerak pemerintahan Desa sangat menentukan pengelolaan pemerintahan desa. Administrasi Desa meliputi :

1. Administrasi Umum yang terdiri dari: Buku Keputusan Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, Buku Kekayaan Desa, Buku Agenda, Buku Ekspedisi, Buku Aparat Desa, dan buku Tanah Desa.
2. Administrasi Kependudukan meliputi: Buku penduduk, Buku Penduduk sementara, Buku perkembangan penduduk, Buku kartu keluarga, Buku tanda penduduk, Buku jumlah penduduk.
3. Administrasi Keuangan Desa meliputi: Buku anggaran Desa, buku Kas umum, Buku Kas pembantu (Wijaya, 2002;88).

2.7. Pandangan Islam mengenai Administrasi Pemerintahan

Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal dikehidupan kita melainkan islam yang telah memberikan arahan dan petunjuknya. Semua kandungan dalam ajaran islam bertujuan untuk menjadikan umatnya hidup sejahtera didunia dan akhirat. Administrasi pemerintahan di dalam Islam sudah dilakukan sejak masa Rasulullah memimpin pemerintahan di Madinah. Sebagai utusan Allah, yang wajib diikuti, diteladani dan diambil ajaran-ajarannya, dengan tidak mengikuti selain ajarannya, ataupun mengambil ajaran manusia yang lain.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul untukmu, maka ambillah, dan apa saja yang dilarangnya, maka tinggalkanlah.” (QS. Al Hasyr [59]: 7)

Apa yang sudah tertulis didalam Al Qur'an dan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah serta dilanjutkan oleh penggantinya (masa Khulafaur Rasidin) dalam menjalankan pemerintahan, sudah sepatutnya kita ikuti dan kita contoh dalam menjalankan administrasi pemerintahan sekarang ini. Islam juga mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara' kepada seluruh manusia tanpa membedakan individu-individunya. Firman Allah swt.

وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

"Hendaklah kamu menetapkan hukum diantara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Allah" (QS. Al Maidah [5]: 49)

Didalam islam juga dikatakan bahwasannya seorang pemimpin haruslah memiliki sifat Sidik (benar), Amanah (dipercayai), Tabligh (menyampaikan), Fatonah (cerdas). Dan seorang pemimpin suatu wilayah juga harus menjalankan tugasnya dengan baik karena menyangkut dengan kehidupan dan kesejahteraan orang banyak. Rasulullah saw bersabda:

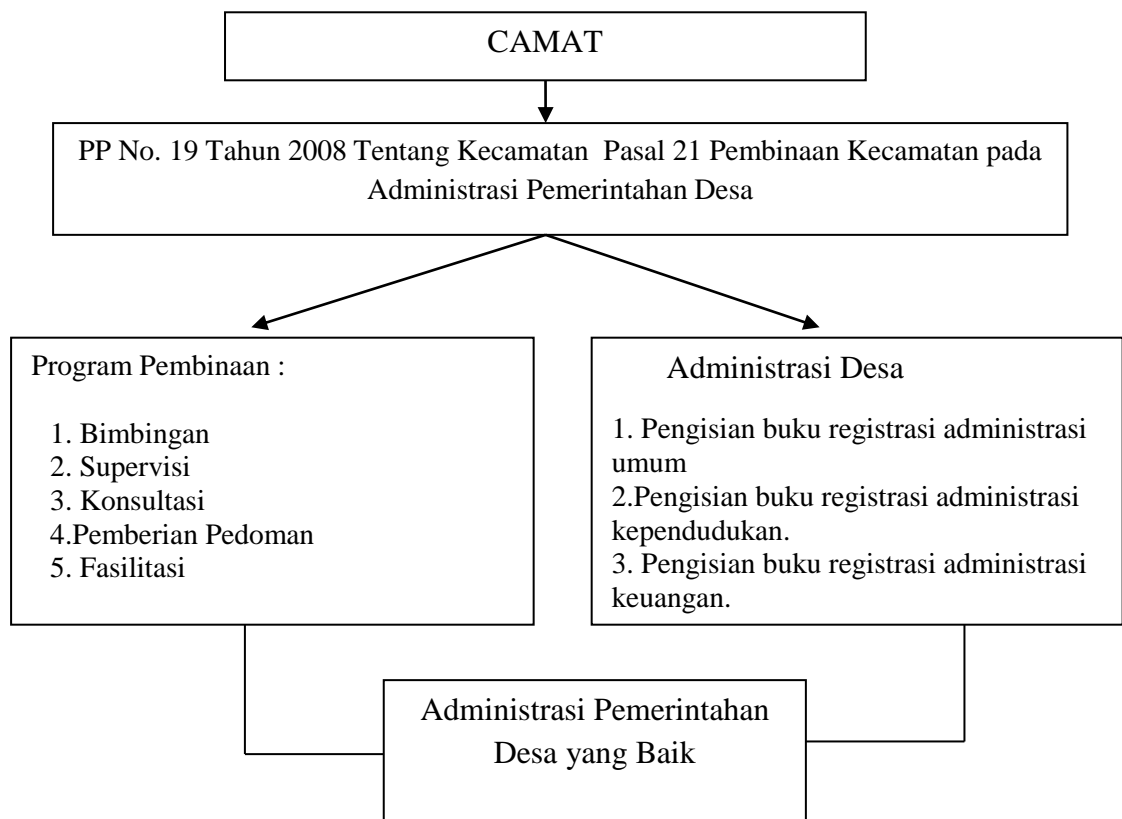
"Seorang imam(kepala negara)adalah perngatur dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusannya tersebut".

Islam memiliki konsep administrasi negara dan adminisitrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw selama memimpin masyarakat di Madinah. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya

menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.

Sifat Administrasi Negara dalam Islam dibangun berdasarkan falsafah: *wa-in kaana dzu 'usratin fanadhiratun ila maysarah* (jika ada orang yang mempunyai kesulitan, maka hendaknya dilihat bagaimana memudahkannya). Islam juga menjaga Kualitas SDM Aparat yang unggul guna mewujudkan *Clean & Good Governance*. Keunggulan SDM para aparat yang mendapatkan amanat untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi adalah kewajiban dan tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan diakhirat.

2.8. Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Penelitian 2011

2.9. Konsep Operasional

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33). Untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna, persepsi atau untuk memudahkan penganalisaan dan menghilangkan kerancuan definisi tentang beberapa konsep, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional, yaitu :

1. Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan kualitas dan semangat kerja Aparat Desa yang dilakukan oleh Camat Mempura Kabupaten Siak.
2. Kecamatan Mempura Kabupaten Siak untuk mencapai keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan.
3. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten / Kota.
4. Yang dimaksud dengan Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bimbingan yang dimaksud dengan pembimbingan adalah upaya-upaya yang dilakukan Camat dalam memberikan pelatihan, pengarahan, petunjuk, mengadakan evaluasi dan rapat kerja terhadap Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

6. Supervisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan dan pembinaan dari atasan terhadap bawahan dalam pengawasan langsung melalui kunjungan kedesa dan pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan dan pengawasan terhadap Kepala desa, aparat desa dan tertib administrasi pemerintahan desa.
7. Konsultasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan memberikan masukan, menerima keluhan, memberikan penjelasan, Mejalin komunikasi dan memberikan solusi demi kelancaran tugas.
8. Pemberian pedoman disini memberikan pedoman-pedoman berupa juknis, perda dan buku-buku tentang penyelenggaraan pemerintahan, menjelaskan pedoman tersebut kepada apartat desa ataupun mendatangkan tenaga ahli menunjuki cara pendataan, pengisian, dan pelaporan kegiatan administrasi desa.
9. Fasilitasi yang dimaksud disini memfasilitasikan kegiatan Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memfasilitasi penyusunan peraturan desa, Fasilitasi tata administrasi, Fasilitasi tugas kepala desa, Fasilitasi kerjasama antar desa dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

Berikut ini dapat dilihat operasional variabel yang menyajikan konsep dan indikator dari peranan Camat dalam membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 21 Pembinaan Kecamatan pada Administrasi Pemerintahan Desa dan penulis menambah satu indikator yaitu pemberian pedoman yang diambil dari Dalam pasal 1 ayat 15 PP No. 72 tahun 2005 Tentang Desa yang dianggap penulis sangat membantu dalam pembinaan. Dan disini penulis menginklud pada setiap point pengawasan kedalam supervise karena supervise

juga merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. sebagai berikut:

Tabel II.I : Operasional variabel tentang Peranan Camat dalam pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di kecamatan Mempura Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Thoha (2003;182) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni pertama, pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan kedua, pembinaan kepada perbaikan atas sesuatu.	Pembinaan Adminisrtasi Pemerintahan Desa	1. Bimbingan	a. Adanya Pelatihan b. Adanya Rapat kerja c. Memberi Pengarahan d. Memberi Petunjuk e. Melakukan Evaluasi
		2. Supervisi	a. Pengawasan langsung melalui kunjungan langsung kedesa b. Pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan c. Pengawasan terhadap kepala desa d. Pengawasan terhadap aparat desa e. Pengawasan terhadap tertib administrasi
		3. Konsultasi	a. Memberi masukan b. Menerima keluhan c. Memberi penjelasan d. Menjalin komunikasi e. Memberikan solusi kelancaran tugas
		4. Pemberian Pedoman	a. Pemberian juknis b. Pemberian buku-buku c. Menjelaskan isi Pedoman d. Mamfaat Pedoman e. Mendatangkan tenaga ahli
		5. Fasilitasi	a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa b. Fasilitasi tata administrasi c. Fasilitasi tugas kepala desa d. Fasilitasi kerjasama antar desa e. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

Sumber : Olahan Penelitian 2011

2.10. Teknik Pengukuran

Untuk menganalisis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dikecamatan mempura kabupaten siak, maka penulis melakukan pengukuran terhadap setiap indicator variabel penelitian dengan menggunakan skala likert.

Menurut Sugiono (2007;107) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variabel dan indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan ataupun pernyataan.

Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, maka jawaban setiap item instrument dari responden dalam kuisioner dibedakan dalam tiga kategori dengan nilai skor seperti pada tabel berikut;

Tabel II.2. Skala pengukuran

No	Kategori	Skor
1.	Baik	3
2.	Cukup Baik	2
3.	Kurang Baik	1

Sumber: Data Olahan Penelitian 2011

Kemudian untuk menganalisa masing-masing indicator variabel penelitian, terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula:

Skor Tertinggi: Jumlah Sub Indikator x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi

Skor Terendah: Jumlah Sub Indikator x Jumlah Responden x Nilai Terendah

Interval:
$$\frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Skala}}$$

Dari Formula diatas, dapat diketahui bahwa:

Skor Tertinggi: $5 \times 51 \times 3 = 765$

Skor Terendah: $5 \times 51 \times 1 = 255$

Interval : $\frac{765 - 255}{3} = 170$

Dari hasil diatas, untuk mengetahui penilaian dari masing-masing indikator variabel tentang pembinaan administrasi pemerintahan desa maka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bimbingan dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, pengukurannya dengan 5 sub indikator yang dinilai, dengan 51 responden dengan skor tertinggi 765 dan skor terendah 255 dengan nilai interval 170, dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada pada interval 595 – 765.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada pada interval 425 – 594.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada pada interval 255 – 424.

2. Supervisi Bimbingan dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, pengukurannya dengan 5 sub indikator yang dinilai, dengan 51 responden dengan skor tertinggi 765 dan skor terendah 255 dengan nilai interval 170, dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada pada interval 595 – 765.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada interval 425 – 594.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada interval 255 – 424.

3. Konsultasi Bimbingan dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, pengukurannya dengan 5 sub indikator yang dinilai, dengan 51 responden dengan skor tertinggi 765 dan skor terendah 255 dengan nilai interval 170, dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada interval 595 – 765.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada interval 425 – 594.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada interval 255 – 424.

4. Pemberian Pedoman Bimbingan dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, pengukurannya dengan 5 sub indikator yang dinilai, dengan 51 responden dengan skor tertinggi 765 dan skor terendah 255 dengan nilai interval 170, dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada interval 595 – 765.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada interval 425 – 594.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada interval 255 – 424.

5. Fasilitasi Bimbingan dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, pengukurannya dengan 5 sub indikator yang dinilai, dengan 51 responden dengan skor tertinggi 765 dan skor terendah 255 dengan nilai interval 170, dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada interval 595 – 765.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada interval 425 – 594.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada interval 255 – 424.

Kemudian untuk menganalisis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa Kecamatan Mempura, terlebih dahulu harus diketahui nilai interval dengan menggunakan formula:

Skor Rata-rata Tertinggi:

Jumlah indikator x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi

Skor Rata-rata Terendah:

Jumlah Indikator x Jumlah Responden x Nilai Terendah

Interval :
$$\frac{\text{SkorRata-rataTertinggi} - \text{SkorRata-rataTerendah}}{\text{Skala}}$$

Dari formula diatas, dapat diketahui bahwa:

Skor Rata-rata Tertinggi : $5 \times 51 \times 3 = 765$

Skor Rata-rata Terendah : $5 \times 51 \times 1 = 255$

$$\text{Interval} : \frac{765 - 255}{3} = 170$$

Dari hasil diatas, untuk mengetahui penilaian variabel pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil rekapitulasi setiap dari sub-sub indikator variabel dan dibagi dengan jumlah indikator penelitian.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dikecamatan mempura kabupaten siak pengukurnya dengan 5 (lima) indikator variabel yang dinilai dengan skor rata-rata tertinggi 765 dan skor rata-rata terendah 255 dengan interval 170, maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada pada interval 595 – 765.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada pada interval 425 – 594.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner berada pada interval 255 – 424.

2.11. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam bentuk kesimpulan sementara sebagai berikut diduga Administrasi Desa di Kecamatan Mempura belum optimal dikarenakan masih rendahnya Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Pemberian Pedoman, Fasilitasi yang diberikan Camat dalam membina administrasi Pemerintahan Desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, yang mana pada hasil penelitiannya lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.

1.2. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian pada Peranan Camat dalam Membina administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dilakukan di kantor kecamatan Mempura, dan kantor desa di kecamatan Mempura untuk mengetahui sejauh mana penilaian aparturnya terhadap peranan camat, dan dilakukan pada bulan Februari tahun 2012.

1.3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yaitu meneliti semua elemen dalam wilayah penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Camat Mempura dan Aparat desa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Dari populasi tersebut diambil sebagian untuk ditetapkan sebagai sampel dengan menggunakan teknik purposive yang mana menurut Sugiyono (2007;96) Sampling Purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang mempunyai tujuan tertentu dengan alasan sampel mampu menguasai masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi Sampel pada penelitian ini tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel tentang Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

No	Jenis Populasi	Populasi	Responden	Persentase
1.	Camat	1	1	100%
2.	Sekretaris Camat	1	1	100%
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	1	1	100%
4.	Kepala Desa			
	a. KADES Benteng Hulu	1	1	100%
	b. KADES Kampung Tengah	1	1	100%
	c. KADES Paluh	1	1	100%
	d. KADES Benteng Hilir	1	1	100%
	e. KADES Koto Ringin	1	1	100%
	f. KADES Sei. Mempura	1	1	100%
	g. KADES Merempan hilir	1	1	100%
	h. KADES Teluk Merempan	1		100%
5.	Sekretaris Desa	8	8	100%
6.	Kepala Urusan			
	a. KAUR Benteng Hulu	3	3	100%
	b. KAUR Kampung Tengah	3	3	100%
	c. KAUR Paluh	3	3	100%
	d. KAUR Benteng Hilir	3	3	100%
	e. KAUR Koto Ringin	3	3	100%
	f. KAUR Sei. Mempura	3	3	100%
	g. KAUR Merempan hilir	3	3	100%
	h. KAUR Teluk Merempan	3	3	100%
7.	Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	8	8	100%
Jumlah		51	51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Untuk aparat Pemerintahan Kecamatan Mempura jumlah populasi ditetapkan sebanyak 3 orang sebagai sampel ini dipilih karena hanya tiga orang tersebut yang terkait dalam Pembinaan Tugas Kepala Desa. Sementara untuk masing-masing desa dipilih sebagai sampel dilihat berdasarkan jabatan di Pemerintahan Desa Tersebut yaitu Kepala desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur pembangunan, Kaur pemerintahan dan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau 6 orang sebagai sampel dari masing-masing desa.

1.4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan, yaitu data yang berkaitan dengan proses Peranan Camat dalam membina Administrasi Desa. Yang diperoleh melalui penyebaran kuisisioner (angket) yang meliputi: Identitas responden, data hasil kuesioner, data hasil wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari instansi pemerintahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data ini merupakan data yang sudah tersedia dari objek peneliti yang diambil oleh peneliti dari tempat penelitian dimana data ini bersifat telah dipublikasikan atau diolah sebelumnya. Data ini bisa berupa penjelasan umum, struktur organisasi dan fungsi setiap unit kerja, keadaan geografis, keadaan penduduk dan data sekunder lain yang dianggap perlu dan berguna bagi peneliti.

1.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik :

- a. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung keobjek yang akan diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat.
- b. Wawancara (interview) : yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu kepada responden dan informan untuk memperoleh data mengenai masalah yang berhubungan/berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Kuisioner (daftar pertanyaan) : yaitu penulis memberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk diisi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian guna untuk lebih mengetahui sejauh mana peranan Camat sebagai Pembina pemerintahan Desa.

1.6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah Deskriptif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran yang terperinci mengenai pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan desa berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan. Kemudian data yang ada dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian dan tabel-tabel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Kecamatan

Kecamatan Mempura adalah kecamatan yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Siak. Pemerintah Kecamatan Mempura yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Siak yang kemudian terpisah menjadi wilayah kecamatan di Kecamatan Mempura.

Kecamatan Siak dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Mempura dan Siak yang dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan pada Perda No. 04 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi serta mempermudah jangkauan pembangunan pemerintahan Kecamatan. Kecamatan Mempura yang posisi pusat pemerintahannya ada di Benteng Hilir, juga merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Mempura.

4.2. Geografis Kecamatan Mempura

Kecamatan Mempura terletak antara : $0^{\circ}42'$ - $0^{\circ}57'$ Lintang Utara dan $101^{\circ}43'$ - $102^{\circ}14'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 188.22 Ha. Kecamatan Mempura berbatasan dengan :

- UTARA : Kecamatan Siak
- SELATAN : Kecamatan Dayun
- BARAT : Kecamatan Koto Gasib
- TIMUR : Kecamatan Pusako

Kecamatan Mempura terdiri dari 8 Desa yaitu: Desa Koto Ringin, Paluh, Benteng Hilir, Benteng Hulu, Kampung Tengah, Sei. Mempura, Merempan Hilir, dan Teluk Merempan. Dengan batas wilayah pada table berikut:

Tabel IV.1 Batas dan luas Desa di Kecamatan Mempura Tahun 2012

D e s a	Utara	Selatan	Barat	Timur	Luas (Ha)
Benteng Hulu	Sungai Siak	Kecamatan Dayun	Kp Tengah	Benteng Hilir	11,13 1
Benteng Hilir	Kecamatan Pusako	Paluh	Sungai Siak	Kecamatan Pusako	14,42 6
Paluh	Sungai Siak	Kecamatan Dayun	Sungai Mempura	Benteng Hulu	13.72 1
Kota Ringin	Sungai Siak	Kec. Dayun	Benteng Hulu	Desa Paluh	46,87 5
Kampung Tengah	Koto ringin	Benteng Hilir	Sungai Siak	Kecamatan Pusako	10,72 1
Sungai Mempura	Sungai Siak	Kecamatan Dayun	Merempan Hilir	Kp Tengah	31,34 1
Merempan Hilir	Sungai Siak	Dayun	Kec. Koto Gasib	Sungai Mempura	8.243
Teluk Merempan	Sungai Siak	Dayun	Sri Gemilang	Merempan Hilir	3.413
					188.2 2

Sumber: Kantor Camat Mempura Tahun 2012

Dan dari aspek Geologi wilayah Kecamatan Mempura seperti pada umumnya wilayah Kecamatan Mempura terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Hampir seluruh desa di Kecamatan Mempura berada di daerah aliran sungai yaitu Sungai Mempura, sehingga dengan demikian sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah. Demikian pula dengan keseharian penduduk wilayah ini, banyak pula yang menggantungkan kehidupan mereka dengan memanfaatkan keberadaan Sungai Siak.

4.3. Demografis Kecamatan Mempura

a. Struktur Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Mempura adalah: 13.084 jiwa (*Kantor Camat Mempura*).

Tabel IV.2 Klasifikasi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	6756
2.	Perempuan	6328
Jumlah		13.084

Sumber: Kantor Camat Mempura Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk kecamatan mempura yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Dimana jumlah penduduk di Kecamatan Mempura yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6756, sementara penduduk di Kecamatan Mempura yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 6328 dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 13.084 jiwa.

Untuk mengetahui jumlah penduduk Kecamatan Mempura menurut umur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.3 Klasifikasi Penduduk Kecamatan Mempura berdasarkan umur

No	Umur (Tahun)	Jumlah
1.	0-5 Tahun	1627
2.	6-12 Tahun	1697
3.	13-16 Tahun	1144
4.	17-19 Tahun	893
5.	20-25 Tahun	1379
6.	26-39 Tahun	2814
7.	40-55 Tahun	2119
8.	56-60 Tahun	618
9.	60 Tahun keatas	307
Jumlah		13.084

Sumber: Kantor camat mempura 2012

Dari rincian tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Mempura yang berumur 26 s/d 30 tahun merupakan penduduk yang paling banyak dengan jumlah 2814 jiwa, sedangkan yang terkecil adalah penduduk yang berusia 60 tahun keatas yaitu sebanyak 307 jiwa.

b. Pendidikan

Kecamatan Mempura merupakan Kecamatan yang masih sangat muda saat ini sangat membutuhkan segenap dukungan seluruh daerah bawahannya untuk berperan serta dalam proses pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut peran pendidikan di daerah ini dirasa sangat perlu ditingkatkan baik berupa fasilitas penunjang maupun sumber daya guru pengajar sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Meski demikian penduduk Kecamatan Mempura secara formal ada yang hanya tamat sekolah dasar (SD) dan ada juga yang sampai pada tingkat perguruan tinggi.

Untuk mengetahui rinci tentang tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Mempura dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.4 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Kecamatan Mempura

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Sekolah Dasar (SD)	4479	34,23%
2.	SMP	2191	16,75%
3.	SMA	1963	15,00%
4.	Akademi	479	3,66%
5.	Sarjana	409	3,13%
6.	Tidak Tamat SD	886	6,77%
7.	Tidak Tamat SMP	368	2,81%
8.	Tidak Tamat SMA	338	2,58%
9.	Tidak Sekolah	1971	15,07%
Jumlah		13084	100%

Sumber: Kantor Camat Mempura 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Mempura masih banyak yang menempati jenjang Sekolah Dasar dengan persentase 34,23% yaitu sebanyak 4479 orang, dengan demikian menunjukkan masih banyaknya generasi muda yang akan meneruskan menjalankan roda pemerintahan dan memajukan pembangunan dikecamatan Mempura.

Untuk menyelenggarakan pendidikan formal, di Kecamatan Mempura telah tersedia lembaga pendidikan. Untuk mengetahui lembaga pendidikan formal yang telah ada di Kecamatan Mempura dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5 Fasilitas Pendidikan Formal di Kecamatan Mempura

No.	Jenis Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	PAUD	4	-	4
2.	TK	5	-	5
3.	MDA	5	-	5
4.	SD	10	-	10
5.	SMP	2	-	2
6.	SMA	2	-	2
Jumlah		28	-	28

Sumber: Kantor Camat Mempura 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitasi pendidikan formal Kecamatan Mempura terdapat 24 lembaga pendidikan, yaitu 4 buah PAUD, 5 buah TK, 5 buah MDA dan 10 buah pendidikan SD, sedangkan pendidikan Menengah Pertama (SMP) ada 2 buah dan pendidikan Menengah atas (SMA) ada 2 buah.

c. Mata Pencarian

Sesuai dengan daerah yang berada dipinggiran sungai dan daratan yang juga luas, sehingga mata pencarian penduduk di Kecamatan Mempura beraneka ragam. Sebagian besar masyarakat mempura menjadi petani kemudian nelayan,

buruh, karyawan Swasta, pegawai negeri dan lain-lain. Luas areal Kecamatan Mempura adalah 188.216 Km dengan kepadatan penduduk kecamatan adalah 0,10 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kesuburan tanah secara umum adalah sedang dengan sebagian besar lahan pertanian digunakan untuk perkebunan. Sedangkan topografi Kecamatan Mempura secara umum adalah datar dengan sedikit berbukit-bukit.

Untuk mengetahui mata pencerian masyarakat Kecamatan Mempura, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.6 Mata Pencarian penduduk Kecamatan mempura

No.	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1.	PNS	377	2,88%
2.	ABRI	36	0,28%
3.	POLRI	76	0,58%
4.	SWASTA	2319	17,72%
5.	BURUH	1543	11,79%
6.	PETANI	2691	20,57%
7.	NELAYAN	222	1,70%
8.	TIDAK BEKERJA	5820	44,48%
Jumlah		13.084	100%

Sumber: Kantor Camat Mempura 2012

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Mempura mata pencariannya sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu sebanyak 2691 orang atau (20,57%). Penduduk kecamatan mempura pada umumnya bekerja sebagai petani karet dan sawit.

d. Agama

Banyaknya pendatang yang pindah datang dari berbagai daerah ke Kecamatan Mempura menjadikan ada berbagai agama seperti: Islam, Katolik, Protestan, Budha dan lain-lain yang ada disekitar Kecamatan mempura, meskipun

pada dasarnya mayoritas penduduk asli yang ada dikecamatan mempura beragama islam.

Untuk melihat lebih jelas mengenai agama yang ada di Kecamatan Mempura dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.7 Agama Penduduk Kecamatan Mempura

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	ISLAM	12596	96,27%
2.	KATOLIK	133	1,02%
3.	PROTESTAN	298	2,28%
4.	HINDU	13	0,10%
5.	BUDHA	34	0,26%
6.	KONG HO CU	10	0,07%
JUMLAH		13084	100%

Sumber: Kantor Camat Mempura 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Mempura mayoritas adalah beragama Islam dengan jumlah 12596 orang atau (96,27%) yang mana pada umumnya penduduk asli Mempura.

Meskipun ada berbagai Agama yang dianut oleh masyarakat, tetapi sejauh ini di Kecamatan Mempura hanya ada rumah ibadah bagi orang islam yaitu mesjid dan musolla. Untuk lebih jelasnya lagi dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.8 Rumah Ibadat di Kecamatan Mempura

No.	Jenis Rumah Ibadat	Jumlah
1.	Mesjid	22
2.	Musolla	18
3.	Gereja	-
4.	Vihara	-
5.	Klenteng	-
Jumlah		40

Sumber: Kantor Camat Mempura 2012

Dari tabel diatas memberi penjelasan bahwa sejauh ini rumah ibadah yang ada di Kecamatan Mempura hanyalah rumah ibadat bagi masyarakat yang memeluk agama islam yaitu mesjid sebanyak 22 buah dan musolla sebanyak 18 buah dikarenakan mayoritas masyarakat beragama islam meskipun ada sebagian kecil masyarakat menganut agama lain tetapi belum ada rumah ibadah selain mesjid dan musolla di Kecamatan Mempura.

4.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dari Susunan Organisasi Pemerintahan

Kecamatan tersebut adalah:

A. Camat

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pelimpahan urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

B. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian Keuangan, Umum dan membuat laporan pelaksanaan tugas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan umum;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan kecamatan.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan Kebijakan Administrasi umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,

mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang penyusunan program, perencanaan dan pelaporan.

2. Sub bagian keuangan

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

3. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian.

C. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan;

Rincian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi tata pemerintahan;
- b. menyelenggarakan penilaian lomba desa tingkat kecamatan;
- c. menyelenggarakan fasilitasi kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisian antar desa;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil, inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayahnya;
- e. menilai prestasi kerja bawahan untuk
- f. merencanakan dan menyusun serta menyelenggarakan program-program kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat lintas desa dalam wilayah kecamatan;

- g. mempersiapkan bahan dan data untuk penyelenggaraan pemilihan umum;
- h. mempersiapkan bahan dan data untuk pembinaan Ideologi Negara, kesatuan bangsa dan peningkatan partisipasi politik masyarakat;
- i. melaksanakan pembinaan keagrarian dalam rangka tertib pertanahan;
- j. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan dan memberikan solusi pemecahan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- l. membuat laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Rincian tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Membantu koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana dalam wilayah desa;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perekonomian;
- f. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayahnya;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam wilayah kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan temu karya unit daerah kerja pembangunan;

- i. Merencanakan dan menyusun program pelaksanaan kegiatan perekonomian dan usaha kecil masyarakat lintas desa;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi kelancaran produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat;
- k. Membantu instansi terkait dalam penataan dan pemuktahiran data masyarakat miskin;
- l. Memfasilitasi pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga;
- m. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga keagamaan, pemberian bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah;
- n. Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- o. Mengkoordinasikan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- p. Memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan
- q. Melaksanakan pembinaan kegiatan peningkatan partisipasi dan peranan wanita;
- r. Memberi saran dan pertimbangan kepada Camat;
- s. Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
- t. Membuat laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

E. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban Umum.

F. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pemberian kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman
- b. Mengolah, merumuskan dan mengevaluasi program yang terkait dengan kesejahteraan rakyat;
- c. Memfasilitasi kegiatan perkoperasian, dunia usaha, perdagangan dan perbankan;
- d. Mendorong dan memberdayakan kelompok tani dan peternak;
- e. Melayani dan memberdayakan organisasi keagamaan, PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- f. Mendorong dan memberdayakan organisasi profesi;
- g. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kesejahteraan pada Sekretaris Kecamatan;
- h. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier;
- j. Membuat laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
PEMERINTAHAN KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK**

4.5. Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa mempunyai Tugas

- a. Membina kehidupan masyarakat
- b. Membina perekonomian Desa
- c. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa
- d. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan sebagai Peraturan Desa bersama BPD

b. Pemerintah Desa mempunyai fungsi

- a. Pelaksana Pembina masyarakat
- b. Pelaksana Pembina perekonomian Desa
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Pelaksana musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat masyarakat Desa
- e. Penyusunan dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan sebagai Peraturan Desa bersama BPD

a. Kepala Desa berkedudukan sebagai

- a. Pimpinan organisasi pemerintah desa bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa
- b. Pimpinan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta mejalin kerjasama dengan pimpinan masyarakat lain
- c. Pendamai perselisihan di desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Kepala Desa mempunyai Tugas dan Kewajiban

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa
- c. Membina Perekonomian Desa
- d. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa
- f. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
- g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai peraturan Desa
- h. Mengajukan kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan

c. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa. Dengan uraian tugas sebagai berikut;

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretaris Desa
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretaris Desa dan keadaan Desa
- d. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa
- e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan

- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat
- g. Menyusun rencana penerapan dan belanja Desa
- h. Mengadakan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan Desa
- i. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Desa
- j. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan kepada Kepala Desa
- k. Mengadakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencabutan administrasi pertanahan
- l. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan

d. Kepala Urusan pemerintah dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di Desa
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Melaksanakan administrasi pertanahan
- d. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa
- e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (HANSIP)
- f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan Desa
- g. Melakukan tugas lain yang dilakukan oleh sekretaris desa

e. Kepala urusa pembangunan dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di Desa
- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa
- c. Menghimpun data potensi Desa menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan
- d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan hasil guna pembuatan daftar usulan rencana proyek/daftar usulan kegiatan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa

f. Kepala urusan umum dan membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. Melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar serta melaksanakan tata kearsipan
- b. Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat atau naskah lainnya
- c. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat-alat tulis kantor serta memelihara dan perbaikan peralatan kantor
- d. Menyusun jadwal atau mengikuti perkembangan pelaksanaan piket
- e. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa

- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi desa
- h. Mencatat investasi kekayaan desa
- i. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan aparat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga pada umumnya
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris Desa.

g. Kepala Urusan Keuangan dan membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk dikembangkan
- c. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh Desa
- d. Melakukan kegiatan administrasi kegiatan keuangan Desa
- e. Merencanakan penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa untuk dikonsultasikan dengan BPD
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

h. Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan tugas kepala desa diwilayah kerjanya. Dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya
- b. Melaksanakan keputusan Desa diwilayah kerjanya
- c. Melaksanakan kebijakan kepala Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi cara berfikir seseorang, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, pola fikir dan wawasan yang dimilikinya. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.1 Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Lulusan SMP	13	25,5%
2.	Lulusan SMA	30	58,8%
3.	Lulusan Diploma	2	3,9%
4.	Lulusan S1	4	7,8%
5.	Lulusan S2	2	3,9%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang terbanyak dari responden yaitu pada tingkat SMA sebanyak 30 orang atau 58,8%. Selanjutnya pada tingkat SMP sebanyak 13 orang atau 24,5%, lulusan S1 4 orang

atau 7,8%, sementara lulusan S2 2 orang atau 3,9%, dan Diploma 2 orang atau 3,9%.

Dari penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah pada pendidikan SMA dengan 30 orang responden atau 58,8% dan yang terkecil adalah Diploma dengan jumlah 2 orang atau 3,9%. Hal ini menunjukkan beragam tingkat pendidikan responden dan beragam pula jawaban yang akan didapat dari masing-masing responden.

b. Tingkat Umur

Umur merupakan salah satu yang dapat menentukan kematangan seseorang. Semakin tinggi umur seseorang, maka dinilai semakin dewasa dalam menyikapi setiap fenomena karena telah banyaknya pengalaman yang mereka peroleh. Dari karakteristik responden berdasarkan umur yang menjadi responden dapat diketahui sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.2 Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Umur/Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21-30 tahun	15	29,4%
2.	31-40 tahun	22	43,1%
3.	51 Tahun Keatas	14	27,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden terbanyak adalah pada tingkat 31-40 tahun sebanyak 22 orang atau 43,1%. Kemudian diikuti responden pada tingkat 21-30 tahun sebanyak 15 orang atau 29,4%, dan tingkat umur responden terendah pada tingkat 51 tahun keatas sebanyak 14 orang atau 27,5%.

Hal ini menunjukkan sebagian responden pada penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa dalam berfikir. Sehingga dalam menilai sesuatu tidak lagi mudah dipengaruhi orang lain sehingga responden dapat menilai dengan baik.

c. Jenis Kelamin

Jenis kelamin dinilai perlu untuk dijadikan bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintah. Untuk mengetahui jenis kelamin responden, dapat diketahui sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.3 Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	43	84,3%
2.	Perempuan	8	15,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 51 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 43 orang (84,3%), dan perempuan 8 orang (15,7%). Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan yang menyelenggarakan pemerintahan desa lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.

d. Masa Kerja

Masa kerja sangat mempengaruhi pada tingkat pemahaman akan pekerjaan bagi seseorang, semakin lama seseorang bekerja maka semakin banyak pengetahuannya pada bidang pekerjaannya, semakin lama seseorang bekerja semakin banyak pengalaman kerja yang didapat sehingga bisa melakukan yang terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Tabel V.4 Jumlah Responden berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1.	1-3 tahun	21	41,2%
2.	4-6 tahun	18	35,3%
3.	6-9 tahun	5	9,8%
4.	Diatas 10 tahun	7	13,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Berdasarkan tabel diatas jumlah responden yang memiliki masa kerja 1-3 tahun sebanyak 21 orang atau 41,2%, responden yang memiliki masa kerja 18 orang atau 35,3%, selanjutnya yang memiliki masa kerja diatas 10 tahun ada 7 orang atau 13,7% kemudian 5 orang atau 9,8% yang memiliki masa kerja 6-9 tahun.

Lamanya seseorang dalam menempati suatu pekerjaan sangat menentukan pengalaman seseorang dalam bekerja, dimana seseorang yang sudah lama menjalani suatu pekerjaan akan lebih mengerti dan mempunyai pengalaman yang besar dalam menjalankan pekerjaan untuk seterusnya.

5.2. Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa diKecamatan Mampura Kabupaten Siak.

Pembinaan organisasi bermaksud untuk mengembangkan individu-individu, kelompok, dan atau seluruh sistem dalam organisasi secara keseluruhan. pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagai mana mestinya.

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dalam melakukan pekerjaan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan pekerjaan maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa sebagai penggerak atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam mencapai berbagai keberhasilan pembangunan.

Camat secara umum memimpin penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintahan di desa maupun pemerintahan kelurahan, tugas pembangunan dan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan koordinasi atas instansi vertical. Sebagai pejabat Pembina pemerintahan desa seharusnya camat mempunyai program pembinaan supaya pembinaan yang dilakukan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintahan desa, agar pembinaan bisa berjalan dengan baik maka program pembinaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan.
2. Supervisi.
3. Konsultasi.
4. Pemberian pedoman.
5. Fasilitasi.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasannya yang memberikan pembinaan itu adalah camat dan stafnya sedangkan yang dibina itu adalah aparat pemerintahan desa. Adapun hasil penelitian penulis tentang peranan camat dalam membina administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak berdasarkan pada indikatornya yaitu:

a. Bimbingan

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal. Dengan adanya bimbingan diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada serta bisa meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan agar tujuan bisa tercapai seperti yang diinginkan. Untuk melakukan bimbingan itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah:

1. Memberikan Petunjuk

Memberikan petunjuk dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap aparatur desa sangatlah perlu, karena masih banyaknya tugas-tugas yang belum mereka pahami dalam menertibkan administrasi pemerintahan desa.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pemberian petunjuk yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.5: Jawaban responden tentang pemberian petunjuk terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	18	35,3%
2.	Kadang-kadang	17	33,3%
3.	Tidak ada	16	31,3%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 18 orang atau 35,3% menjawab “Ya” sedangkan responden menjawab “Kadang-Kadang” 17 orang atau 33,3% dalam adanya pemberian petunjuk guna kelancaran tugas-tugas yang dijalankan, dan 16 orang atau 31,3% menjawab “Tidak Ada” sehingga dapat diketahui bahwa Camat Mempura Ada memberikan petunjuk kepada aparatur Desa dalam menjalankan Roda Pemerintahannya.

Tanggapan responden yang terbanyak adalah 18 orang atau 35,5% yang mana mayoritas mereka mengatakan bahwa ada petunjuk yang diberikan oleh pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan tugas yang belum mereka pahami disamping itu berdasarkan Wawancara Kepada Kepala Desa Koto Ringin pada tanggal 20/02/2012 jam 12.28 wib, “ia mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas mereka camat sudah memberikan petunjuk untuk menjalankan tugas-tugas yang dilakukan aparatur desa agar pemerintah desa bisa menjalankan pemerintahannya dengan benar”.

Pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan tugas pemerintah desa memang menjadi tugas pemerintah kecamatan yang mana petunjuk tidak hanya diberikan oleh camat melainkan semua staf yang ada dipemerintah kecamatan yang dianggap memahami permasalahan atau penyelenggaraan tugas pemerintah desa bisa melalui Sekcam ataupun Kepala Seksi yang ada.

2. memberikan pengarahan

Pengarahan sangat dibutuhkan oleh aparat desa terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa karena dengan pengarahan bisa melaksanakan tugas lebih

baik lagi. Tanggapan responden tentang langkah “Memberikan Pengarahan” pada tabel berikut ini.

Tabel V.6: Jawaban responden tentang memberikan pengarahan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	22	43,1%
2.	Kadang-kadang	20	39,2%
3.	Tidak ada	9	17,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan dengan cara memberikan pengarahan kepada apatur pemerintahan Desa dalam melaksanakan roda pemerintahanya diketahui 22 responden atau 43,1% yang menjawab “Ya” sedangkan 20 responden atau 39,2% menjawab “Kadang-Kadang” dan 9 orang atau 17,7% yang menjawab “Tidak ada”.

Mayoritas responden menjawab Ya dengan frekuensi 22 orang atau 43,1% yang mana pemerintah kecamatan memberikan pengarahan-pengarahan terhadap peenyelenggaraan tugas menurut Wawancara kepada Camat Mempura pada hari Selasa 07/02/2012 jam 10.52 wib, “pengarahan-pengerahan pasti diberikan jika pemerintah desa kurang memahami dalam pelaksanaan tugasnya”.

3. Adanya Pelatihan

Pelatihan sangat menunjang kinerja dan prestasi kerja karena dengan pelatihan akan mendapatkan pendidikan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dipemerintahan desa untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dan arti pentingnya penataan tertib

administrasi desa tersebut. Kemudian tanggapan responden tentang langkah “Pemberian Pelatihan” yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan.

Tabel V.7: Jawaban responden tentang Pemberian Pelatihan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	14	27,5%
2.	Kadang-kadang	27	52,9%
3.	Tidak ada	10	19,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 14 orang atau 27,5% menjawab “Ya” sedangkan responden yang menjawab “Kadang-Kadang” 27 orang atau 52,9% dan 10 orang atau 19,6% menjawab “Tidak Ada” sehingga dapat diketahui bahwa Camat Mempura hanya kadang-kadang memberikan Pelatihan kepada aparatur Desa dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada.

Mayoritas responden menjawab kadang-kadang yaitu sebanyak 27 orang atau 52,9%. Hanya kadang-kadang pelatihan yang mereka ikuti, padahal pelatihan bisa meningkatkan kualitas aparatur penyelenggaraan pemerintah karena dengan diadakannya pelatihan-pelatihan akan lebih meningkatkan pemahaman dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah itu bisa tercapai karena diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang handal.

Sejauh ini Adapun pelatihan yang pernah diikuti oleh aparat desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan roda pemerintahannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.8. Kegiatan Pelatihan dalam rangka Pembinaan yang diikuti oleh Aparatur Pemerintah Desa.

N O	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Pembina	Ket
1.	Th. 2008	Pelatihan tata cara pelaksanaan APB Desa dan SPJ ABB desa	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	Sudah
2.	Th.2009	Pelatihan manajemen bagi Kaur. Pem desa.	Kaur. Pem	Camat dan instansi terkait	Sudah
		Pelatihan pemerintah desa dalam bidang pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa, Sekdes	Camat dan instansi terkait	Sudah
3.	Th.2010	-	-	-	Belum
4.	Th. 2011	Pelatihan fasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha kecil makro dan menengah	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	Sudah

Sumber Data: Kecamatan Mempura Kabupaten Siak 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat sejauh ini program pelatihan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tidak menjurus pada peningkatan tata administrasi pemerintahan desa, sementara pelatihan tata penyelenggaraan administrasi sangat dibutuhkan oleh pemerintahan desa karena itu merupakan tugas sehari-hari dan yang menentukan prospek otonomi desa adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya maka dari itu diperlukan pelatihan terhadap penyelenggara pemerintah desa.

4. Adanya Rapat kerja

Dengan diadakan rapat kerja maka permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing penyelenggaraan pemerintah desa bisa dikemukakan dan dipecahkan bersama-sama, dan bisa menunjang perbaikan kinerja aparat desa satu dengan yang lainnya. Adapun tanggapan responden terhadap adanya Rapat Kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.9:Jawaban responden tentang adanya rapat kerja dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	12	23,5%
2.	Kadang-kadang	26	51,0%
3.	Tidak ada	13	25,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan dengan cara mengadakan rapat kerja bersama apatur pemerintahan Desa dalam melaksanakan roda pemerintahanya diketahui 12 responden atau 23,5% yang menjawab “Ya” sedangkan 26 responden atau 51,0% menjawab “Kadang-Kadang” dan 13 orang atau 25,5% yang menjawab “Tidak ada”.

Mayoritas responden menjawab kadang -kadang pemerintah kecamatan mengadakan rapat kerja. Sementara rapat kerja ini sangat memicu untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kinerja yang telah dilakukan selama ini bagi pemerintah desa. Bedasarkan Wawancara Kepada kepala desa Benteng Hilir pada hari Senin 20/02/2012 jam 09.45 wib, “Camat hampir tidak ada melakukan Rapat Kerja, padahal itu semua sangat menunjang kinerja dan memicu untuk melakukan perbaikan-perbaikan”.

Dengan mengadakan rapat kerja dan mengumpulkan aparat desa sebenarnya sangat membantu penyelenggaraan pemerintah desa, dimana dengan itu bisa melakukan perbaikan-perbaikan, bisa saling bertukar pikiran dan menilai kinerja dari masing-masing desa agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.

5. Melakukan Evaluasi

Melakukan Evaluasi “Penilaian” terhadap kinerja pemerintah desa juga bisa meningkatkan semangat kerja, dengan adanya penilaian diharapkan membimbing agar termotivasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi. Kemudian tanggapan responden terhadap adanya Evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.10: Jawaban responden tentang melakukan Evaluasi kerja pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	11	21,6%
2.	Kadang-kadang	30	58,8%
3.	Tidak ada	10	19,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan dengan cara melakukan Evaluasi terhadap kinerja apatur pemerintahan Desa dalam melaksanakan roda pemerintahanya diketahui 11 responden atau 21,6% yang menjawab “Ya” sedangkan 30 responden atau 58,8% menjawab “Kadang-Kadang” dan 10 orang atau 19,6% yang menjawab “Tidak ada”.

Berdasarkan uraian tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap evaluasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap kepala desa evaluasi yang dilakukan pemerintah kecamatan

mendapat jawaban 30 responden atau 58,8% yang menyatakan kadang-kadang . Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Sekretaris Camat Mempura pada hari Kamis, 02/02/2012 jam 10.27 wib, “bahwasannya pihak kecamatan telah melakukan evaluasi ketika akan dan setelah diadakannya alokasi untuk desa”. Dengan diadakannya evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa ini sebenarnya bisa lebih meningkatkan kegairahan dan semangat kerja perangkat desa, dengan adanya penilaian tersebut akan menimbulkan keinginan untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya karena adanya penilaian terhadap sebuah pekerjaan tersebut.

b. Supervise

Untuk tercapainya efektifitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu diadakan suatu tindakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang akan mengawasi jalannya administrasi yang akan diberikan oleh pemerintahan kepada para aparaturnya.

Dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia dikenal adanya pengawasan umum, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung masing-masing staf. Adapun sub indikator dari supevisi yang dilakukan terhadap adminisrtasi pemerintahan desa dapat dilihat pada penilaian sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yang dilakukan langsung oleh atasan memengang sangat membawa pengaruh terhadap kinerja bawahan, dengan adanya pengawasan langsung bisa meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang ada. Untuk

mengetahui sejauh mana tanggapan responden terhadap hasil Pengawasan Langsung yang dilakukan Camat terhadap Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak akan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.11: Jawaban Responden tentang Pengawasan Langsung yang dilakukan terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	8	15,6%
2.	Kadang-kadang	22	43,1%
3.	Tidak ada	21	41,2%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Supervisi yang dilakukan oleh Camat Mempura Kabupaten Siak dengan cara Pengawasan Langsung ditempat kerja dalam rangka untuk meninjau kinerja pemerintahan desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 8 orang atau (15,6%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 22 orang atau (43,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 21 orang (41,2%).

Dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap Pengawasan langsung yang dilakukan oleh pihak Kecamatan mendapat jawaban kadang-kadang sebanyak 22 orang atau (43,1%) . Menurut Wawancara yang dilakukan oleh peneliti Kepala Desa Benteng Hulu (Selasa 14/02/2012;09.25) dan Merempan Hilir (Kamis 09/02/2012;10.05) “menyatakan bahwa pemerintah kecamatan masih terkesan jarang dalam melakukan pengawasan langsung turun kedesda dalam rangka pengawasan terhadap tertib administrasi desa. Padahal

pengawasan langsung ini sangat bermamfaat dan bisa meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam menata administrasi pemerintahan”.

Pengawasan langsung sangat menunjang pelaksanaan tugas aparat desa karena peranan seorang atasan sangatlah dipatuhi oleh bawahan, sehingga dengan pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan sangat menentukan dan menjadikan sebuah pekaerjaan yang berdaya guna dan berhasil guna. Karena peran pemimpin sangatlah kuat dalam penyelenggaraan pemerintah menuju terwujudnya tujuan otonomi.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Kemudian tanggapan responden tentang supervise dengan melakukan Pengawasan tidak langsung dengan memintai laporan tentang kondisi penduduk dan kinerja Pemerintahan Desa pada tabel berikut ini.

Tabel V.12: Jawaban responden tentang Pengawasan Tidak langsung terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	19	37,3%
2.	Kadang-kadang	23	45,1%
3.	Tidak ada	9	17,6%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Tabel diatas menjelaskan tanggapan responden tentang Supervisi yang dilakukan oleh Camat dengan Pengawasan Tidak Langsung dengan meminta laporan diketahui bahwa 19 orang responden atau (37,3%) yang menjawab “Ya”, 23 orang atau (45,1%) yang menjawab “Kadang-kadang” dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 9 orang atau (17,6%).

Pengawasan tidak langsung juga bisa membantu tertib penataan administrasi desa, yang mana dengan pengawasan tidak langsung pihak kecamatan bisa mengetahui perkembangan-perkembangan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Sejauh ini untuk Pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan kependudukan setiap bulannya sudah dilaksanakan oleh pihak kecamatan, dimana setiap desa harus menyerahkan laporan kependudukannya kepada pihak kecamatan. berdasarkan Wawancara kepada Sekcam Mempura pada hari Kamis 02/02/2012 jam 10.27 “ia mengatakan bahwa jika Pemerintah Desa tidak menyerahkan laporan kependudukannya maka pihak kecamatan akan Menyurati agar menyerahkan laporan kependudukannya”.

3. Pengawasan terhadap Kepala Desa

Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden mengenai Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap kinerja kepala desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.13: Jawaban Responden tentang pengawasan terhadap kepala desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	18	35,3%
2.	Kadang-kadang	26	51,0%
3.	Tidak ada	7	13,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Supervisi yang dilakukan oleh camat mempura kabupaten Siak dengan cara Pengawasan Langsung

ketempat kerja dalam rangka untuk meninjau kinerja pemerintahan desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 18 orang atau (35,3%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 26 orang atau (51,0%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 7 orang (13,7%).

Berdasarkan uraian tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap kepala desa mayoritas mendapat jawaban kadang-kadang sebanyak 26 orang atau (51,0%). Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti Kepala Desa Benteng Hilir pada hari Senin 20/02/2012 jam 09.45 wib “mengatakan bahwa sejauh ini pihak kecamatan hanya meminta laporan kependudukan setiap bulannya. Sementara untuk laporan harian kerja kepala desa tidak pernah diminta untuk melaporkan dan sejauh ini oleh camat padahal dengan itu bisa membantu camat untuk mengetahui kinerja Kepala Desa”.

Dengan meminta laporan harian kerja sebenarnya sudah sedikit membantu pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, karena sedikit banyaknya bisa mengetahui bagaimana kinerja kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa.

4. Pengawasan terhadap Aparatur Desa

Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap aparatur yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.14: Jawaban Responden tentang pengawasan terhadap Aparatur desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	11	21,6%
2.	Kadang-kadang	22	43,1%
3.	Tidak ada	18	35,3%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Supervisi yang dilakukan oleh camat mempura kabupaten Siak dengan sub indikator melakukan pengawasan terhadap aparatur desa ditempat kerja dalam rangka untuk meninjau kinerja pemerintahan desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 11 orang atau (21,6%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 22 orang atau (41,3%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 18 orang (35,3%).

Berdasarkan uraian tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap kepala desa mendapat jawaban kadang-kadang dengan sebanyak 22 orang atau (41,3%). Menurut Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala Desa Teluk Merempan hari Senin 13/02/2012 jam 10.29 wib, “bahwasannya pihak kecamatan masih jarang turun kedesa-desa untuk melihat bagaimana perkembangan aparat penyelenggaraan pemerintahan desa padahal jika melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur desa mereka pasti akan bekerja lebih baik lagi, dengan adanya pengawasan sebenarnya bisa meningkatkan kualitas kerja seseorang dan membangkitkan semangat kerja”.

Pada dasarnya Pengawasan terhadap aparat desa sangatlah perlu dilakukan karena Aparat desa merupakan subjek penggerak dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan sumber daya manusia haruslah baik, dalam pengertian moral dan kapasitasnya karena keberhasilan pencapaian tujuan tidak terlepas dari kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya.

5. Melakukan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.15: Jawaban Responden tentang pengawasan terhadap pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	10	19,6%
2.	Kadang-kadang	27	52,9%
3.	Tidak ada	14	27,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh camat mempura kabupaten Siak dalam rangka untuk meninjau pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 10 orang atau (19,6%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 27 orang atau (52,9%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 14 orang (27,5%).

Berdasarkan uraian tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab pengawasan terhadap tertib

administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh pihak Kecamatan mendapat jawaban kadang-kadang yaitu sebanyak 27 orang atau (52,9%).

Administrasi di pemerintahan desa sangatlah vital dimana segala urusan surat menyurat, tanah, jual beli dan system prosedur dilaksanakan disana. Pengawasan sangatlah dibutuhkan dalam penertiban administrasi pemerintahan desa karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat data yang terkandung didesa tidak hanya berguna bagi pembangunan desa tetapi bagi pembangunan bangsa dan menjadi tolak ukur untuk meratakan pembangunan desa karena desa merupakan integral dari pembangunan bangsa.

c. Konsultasi

Konsultasi merupakan sebuah pertemuan/konvarensi untuk saling bertukar informasi dan saran. Dengan adanya konsultasi pemerintah desa bisa mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan adanya komunikasi yang baik maka proses konsultasi ini tidak akan sulit dilaksanakan.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai konsultasi dapat dinilai melalui sub indikator yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Pemberian Masukan

Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden mengenai pemberian masukan terhadap aparatur pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dapat dilihat berikut ini.

Tabel V.16: Jawaban Responden tentang Konsultasi berupa Pemberian Masukan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	16	31,4%
2.	Kadang-kadang	26	51,0%
3.	Tidak ada	9	17,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pemberian masukan yang dilakukan oleh pihak kecamatan kepada aparatur desa agar bisa memahami dengan baik tugas-tugas yang diberikan dalam menjalankan administrasi pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 16 orang atau (31,4%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 26 orang atau (51,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 9 orang atau (17,6%).

Dapat diketahui mayoritas responden menjawab kadang-kadang yaitu sebanyak 26 orang atau (51,1%), bedasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Benteng Hulu pada hari Senin 14/02/2012 jam 09.25 wib untuk sub indikator konsultasi ini, “ia menyatakan bahwa terkadang masih sulitnya untuk bertemu dengan camat karena masing-masing antara camat dan kepala desa mempunyai kesibukan tersendiri dalam pekerjaannya”.

2. menerima keluhan

Kemudian tanggapan responden tentang penilaian “Menerima Keluhan” dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel V.17: Jawaban responden tentang Konsultasi dengan menerima keluhan dari Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	17	33,3%
2.	Kadang-kadang	24	47,1%
3.	Tidak ada	10	19,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pihak kecamatan dalam Menerima Keluhan dari pemerintahan Desa jika ada kendala-kendala dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 17 orang atau (33,3%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 24 orang atau (47,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 10 orang atau (19,6%).

Maka dapat diketahui mayoritas responden menjawab kadang-kadang, dengan alasan yang sama yaitu masih sulitnya untuk bertemu dengan camat, menurut wawancara kepada kepala desa Paluh pada hari Selasa 21/02/2012 jam 10.46 wib” bahwasannya jika bertemu camat untuk melakukan konsultasi beliau pasti akan menerima keluhan-keluhan pelaksanaan kerja dan dan memberikan jalan keluarnya terhadap kesulitan kerja yang dialami oleh pemerintah desa”.

3. Memberikan Penjelasan

Selanjutnya sub indikator dari konsultasi yaitu berupa memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kesulitan kerja yang dihadapi pemerintah desa. tanggapan responden tentang “Memberikan Penjelasan” maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.18: Jawaban responden tentang konsultasi dengan memberikan penjelasan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	18	15,7%
2.	Kadang-kadang	25	45,1%
3.	Tidak ada	8	39,2%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pihak kecamatan dalam Memberikan Penjelasan Kepada pemerintahan Desa jika ada tugas-tugas yang belum mereka pahami dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 18 orang atau (35,3%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 25 orang atau (49,0%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 8 orang atau (15,7%).

Bedasarkan hasil dari tanggapan responden tersebut diketahui bahwa mayoritas responden menjawab Kadang-kadang yaitu sebanyak sebanyak 25 orang atau (49,0%).

Memberikan penjelasan-penjelasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa merupakan tugas yang melekat bagi pihak kecamatan dimana masik banyak aparat desa yang belum memahami pelaksanaan tugasnya dengan jelas. Penjelasan diharapkan bisa mengurangi angka kesalahan dapal pelaksanaan tusas pemerintah desa.

4. Menjalin Komunikasi

Kemudian tanggapan responden tentang penilaian “Menjalin komunikasi” dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel V.19: Jawaban responden tentang Konsultasi dengan menjalin komunikasi yang baik dari Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	15	29,4%
2.	Kadang-kadang	27	52,9%
3.	Tidak ada	9	17,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa camat dalam menjalin komunikasi dengan pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 15 orang atau (29,4%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 27 orang atau (52,9%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 9 orang atau (17,7%).

Maka dapat diketahui mayoritas responden menjawab kadang-kadang, dengan alasan masih belum optimalnya komunikasi yang terjalin. Berdasarkan Wawancara kepada kepala desa Benteng Hilir pada hari Senin 20/02/2012 jam 09.45 “bahwasannya komunikasi dengan camat selama ini memang belum terjalin dengan baik karena adanya kesibukan masing-masing dan sulitnya untuk bertemu Camat, Terkadang untuk acara desa saja Camat diundang tidak datang, Begitulah pernyataannya kepada peneliti. Pada dasarnya komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, dengan komunikasi yang baik maka akan mendapatkan hasil yang baik.

5. Memberikan Solusi

Kemudian tanggapan responden tentang penilaian “Pemberian solusi” dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel V.20: Jawaban responden tentang memberikan Solusi kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	17	33,3%
2.	Kadang-kadang	24	47,1%
3.	Tidak ada	10	19,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pihak kecamatan dalam Menerima Keluhan dari pemerintahan Desa jika ada kendala-kendala dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 17 orang atau (33,3%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 24 orang atau (47,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 10 orang atau (19,6%).

Maka dapat diketahui mayoritas responden menjawab kadang-kadang yaitu sebanyak 24 orang atau (47,1%). Karena masih ada yang beranggapan sulitnya untuk bertemu dengan camat untuk berkonsultasi.

d. Pemberian Pedoman

Dalam menyelenggarakan sebuah tanggung jawab memang diperlukan pedoman sebagai acuan untuk melaksanakan tugas agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Pedoman bisa berupa Buku, undang-undang, juknis dan lain-lain. Untuk melihat bagaimana pedoman yang diberikan oleh camat kepada pemerintahan desa dapat dilihat pada penilaian berikut ini:

1. Memberikan Petunjuk Teknis

Tabel V.21: Jawaban responden tentang Pemberian petunjuk teknis sebagai pedoman kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	20	39,2%
2.	Kadang-kadang	22	43,1%
3.	Tidak ada	9	17,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Bedasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemberian Pedoman yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dalam rangka Pembinaan terhadap Administrasi Pemerintahan Desa diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 20 orang atau (39,2%) yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 22 orang atau (43,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 9 orang atau (17,6%).

Dari hasil diatas mayoritas responden menjawab kadang-kadang yaitu sebanyak 22 orang atau (43,1%). Bedasarkan wawancara Kepada Kepala Desa Merempan Hilir pada hari Senin 13/02/2012 jam 10.29 wib ”sejauh ini pemerintah kecamatan memberikan memberikan berupa PERDA, Juknis sebagai pegangan dalam menjalankan tugas yang mana diharapkan bisa membantu pelaksanaan tugas pemerintah desa”.

2. Memberikan buku-buku

tanggapan responden mengenai pemberian buku-buku yang bisa membantu ataupun menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang

diberikan kepada pemerintahan desa untuk mengetahui tanggapan responden mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.22: Jawaban responden tentang pemberian buku-buku sebagai pedoman yang diberikan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	17	33,3%
2.	Kadang-kadang	25	49,0%
3.	Tidak ada	9	17,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa manfaat yang didapat oleh responden terhadap Pedoman-Pedoman yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan kepada apatur pemerintahan Desa agar ada acuan dalam melaksanakan pemerintahannya diketahui 17 responden atau 33,3% yang menjawab “Ya” sedangkan 25 responden atau 49,0% menjawab “Kadang-Kadang” dan 9 orang atau 17,7% yang menjawab “Tidak ada”.

Dari jawaban responden diatas mayoritas mengatakan kadang-kadang yaitu sebanyak 25 responden atau 49,0%. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Paluh pada hari Selasa 14/02/2012 jam 09.25 “bahwasannya dalam pemberian buku-buku sebagai petunjuk pemerintah desa menjalankan roda pemerintahannya sejauh ini masih jarang yang ada yaitu berupa pemberian PERDA, undang-undang, dan keputusan-keputusan bupati”.

Pemberian buku-buku pada dasarnya bisa menunjang dan meningkatkan pemahaman tentang arti sebuah pekerjaan, karena banyak mamfaat yang bisa diambil dengan membaca buku dengan tidak adanya pemberian buku-buku tentang penyelenggaraan pemerintahan desa maka kinerja dari aparat desa tidak

bisa diharapkan untuk bisa lebih baik karena pemberian buku juga bisa membantu dan menambah pemahaman mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Menjelaskan Pedoman yang diberikan

Selanjutnya tanggapan responden mengenai menjelaskan pedoman yang diberikan kepada pemerintah desa, karena tidak dengan mudahnya untuk memahami berbagai pedoman yang diberikan untuk membantu dalam memahami tugas dan fungsi yang diemban selanjutnya akan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel V.23: Jawaban responden tentang upaya menjelaskan mengenai Pedoman yang diberikan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	13	25,5%
2.	Kadang-kadang	26	51,0%
3.	Tidak ada	12	23,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pihak kecamatan dalam Memberikan Penjelasan terhadap Pedoman yang diberikan Kepada pemerintahan Desa sebagai panduan dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 13 orang atau (25,5%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 26 orang atau (51,0%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 12 orang atau (23,5%).

Dari uraian diatas mayoritas responden mengatakan kadang-kadang dengan alasan petunjuk yang diberikan hanya kadang-kadang yang mendapatkan penjelasan terlebih terdahulu. Menurut Wawancara kepada Camat hari Selasa 07/02/2012 jam 10.52 “ia mengatakan bahwa jika pedoman yang diberikan ada yang tidak dipahami bisa langsung menanyakannya kepada pemerintahan

kecamatan, jika sebuah pedoman tersebut dikira perlu mendatangkan tenaga ahli maka akan dilaksanakan dengan demikian”.

4. Mamfaat Pedoman

Selanjutnya adalah tanggapan responden mengenai mamfaat yang didapat dari pemberian pedoman yang diberikan tersebut. Untuk mengetahui jawaban reponden mengenai penilaian terhadap sub indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.24: Jawaban responden terhadap mamfaat yang didapat dari pedoman yang diberikan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	18	35,3%
2.	Kadang-kadang	24	47,1%
3.	Tidak ada	9	17,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa manfaat yang didapat oleh responden terhadap Pedoman-Pedoman yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan kepada apatur pemerintahan Desa agar ada acuan dalam melaksanakan pemerintahannya diketahui 18 responden atau 33,3% yang menjawab “Ya” sedangkan 24 responden atau 47,1% menjawab “Kadang-Kadang” dan 9 orang atau 17,6% yang menjawab “Tidak ada”.

Mayoritas responden menjawab kadang-kadang yang mana 24 responden atau 47,1%. Adapun alasan responden yang menyatakan demikian adalah bahwasannya petunjuk tersebut tidaklah cukup membantu pelaksanaan tugas, karena masih banyak yang belum mengerti dengan cara pemberian petunjuk-petunjuk tersebut.

5. Mendatangkan Tenaga Ahli

Dalam pemberian pedoma berupa peraturan-peraturan ataupun sosialisasi peraturan-peraturan bisa dilakukan dengan mendatangkan tenaga ahli untuk menjelaskan perihal tersebut, agar tidak adanya kesalah pahaman terhadap pedoman yang diberikan dan penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik lagi.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai mendatangkan tenaga ahli dalam memberikan Penjelasan terhadap pedoman akan dijelaskan berikut ini.

Tabel V.25: Jawaban responden tentang mendatangkan tenaga ahli untuk menjelaskan Pedoman yang diberikan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	15	29,4%
2.	Kadang-kadang	24	47,1%
3.	Tidak ada	12	23,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pihak kecamatan dalam Memberikan Penjelasan terhadap Pedoman yang diberikan Kepada pemerintahan Desa sebagai panduan dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 15 orang atau (29,4%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 24 orang atau (47,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 12 orang atau (23,5%).

Dari uraian diatas diketahui bahwa mayoritas responden menjawab kadang-kadang sebanyak 24 orang atau (47,1%). Dengan alasan bahwa tidak semua pedoman yang diberikan didatangkan tenaga ahli untuk menjelaskan atau mensosialisasikannya. Bedasarkan Wawancara Kepada Kasi Pemerintahan pada

hari Senin 06/02/2012 jam 09.47 wib “terkadang pedoman yang diberikan memang mendatangkan orang yang ahli jika dibutuhkan untuk menjelaskannya seperti masalah kependudukan, akan mendatangkan dari Dinas kependudukan untuk melakukan sosialisasinya. Jika tidak diperlukan maka cukup dengan menayakan kepada pihak kecamatan”.

e. Fasilitasi

Fasilitasi merupakan upaya memudahkan tugas dan fungsi yang diemban kepada pemerintah desa. Untuk melihat proses fasilitasi yang dilakukan oleh camat dengan penilaian dari sub indikator akan dijelaskan pada penjelasan dibawah ini.

1. Fasilitasi Tata Administasi

Sehubung dengan tanggapan responden mengenai fasilitasi Tata Administrasi dikecamatan mempura maka dapat dilihat pada tabel berikut ini tata.

Tabel V.26: Jawaban responden terhadap Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	15	29,4%
2.	Kadang-kadang	27	52,9%
3.	Tidak ada	9	17,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh camat mempura kabupaten Siak diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 15 orang atau (29,4%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 27 orang atau (52,9%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 9 orang (17,7%).

Hasil tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa fasilitasi tata administrasi mendapat mayoritas jawaban kadang-kadang sebanyak 27 orang atau (52,9%) dengan alasan masih minimnya sarana dan prasarana yang padahal hal tersebut sangat menunjang pelaksanaan tata administrasi pemerintahan desa. adapun sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan tata administrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.27: Sarana dan Prasarana pendukung penyelenggaraan Administrasi

No	Desa	Computer	Filling Kabinet	Mesin ketik	Mesin jenset
1.	Koto Ringin	1 unit (baik)	1 unit (baik)	2 (baik)	1 (baik)
2.	Paluh	1 unit (baik)	1 unit (baik)	1 (baik)	1 (baik)
3.	Benteng Hilir	1 unit (baik)	1 unit (baik)	1 (baik)	1 (baik)
4.	Benteng Hulu	2 unit (baik)	1 unit (kurang baik)	1 (baik)	1 (baik)
5.	Kp.Tengah	2 unit (baik)	1 unit (baik)	1 (baik)	1 (baik)
6.	Sei. Mempura	2 unit (baik)	1 unit (kurang baik)	1 (baik)	1 (baik)
7.	Merempan Hilir	1 unit (baik)	1 unit (kurang baik)	2 (baik)	1 (baik)
8.	T. Merempan	1 (Laptop)	1 unit (Kurang baik)	2 (baik)	1 (baik)

Sumber: Data Kecamatan Mempura, 2012

Bedasarkan data diatas dapat dilihat masih belum memadai sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dikecamatan mempura. Berdasarkan pengamatan peneliti masih banyaknya arsip-arsip pemerintahan desa yang tidak tertata rapi bahkan sudah dalam kondisi tidak baik lagi, dan masih banyak arsip-arsip yang ditumpukkan disamping filling kabinet”.

2. Fasilitasi penyusunan peraturan desa

Kemudian untuk mengetahui jawaban Responden mengenai fasilitasi penyusunan peraturan desa yang diberikan terhadap penyelenggara pemerintah desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.28: Jawaban responden terhadap Fasilitas Penyusunan Peraturan Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	16	31,4%
2.	Kadang-kadang	23	45,1%
3.	Tidak ada	12	23,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Fasilitas yang dilakukan oleh Camat Mempura Kabupaten Siak terhadap Penyusunan Peraturan Pemerintah Desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 16 orang atau (31,4%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 23 orang atau (45,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 12 orang (23,5%).

Dari hasil tanggapan responden tersebut menyatakan bahwa mayoritas responden mengatakan kadang-kadang yaitu sebanyak 23 orang atau (45,1%). Berdasarkan Wawancara kepada sekretaris desa Benteng Hilir pada hari Senin 20/02/2012 jam 09.09 “bahwa dalam penyusunan peraturan desa pemerintahan desa masih mengacu pada peraturan desa sebelumnya, tidak ada pedoman ataupun buku tata cara penyusunan peraturan desa yang diberikan”.

3. Fasilitas Kepala Desa

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan Responden mengenai Fasilitas yang dilakukan pemerintah kecamatan terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang diharapkan bisa mempermudah dan membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengetahui tanggapan responden tentang hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.29: Jawaban responden terhadap Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	21	41,2%
2.	Kadang-kadang	20	39,2%
3.	Tidak ada	10	19,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dilakukan oleh Camat Mempura diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 21 orang atau (41,2%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 20 orang atau (39,2%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 10 orang (19,6%).

Dari hasil tanggapan responden tersebut menyatakan bahwa mayoritas responden mengatakan Ya yaitu sebanyak 23 orang atau (41,2%). Responden yang menyatakan jawaban tersebut beralasan bahwa sudah adanya peningkatan-peningkatan terhadap fasilitas tugas kepala desa. Berdasarkan Wawancara kepada Kepala Desa Paluh pada hari Selasa 14/02/2012 jam 09.20 wib “ia menyatakan bahwa sudah adanya upaya-upaya meningkatkan fasilitas tugas kepala desa dengan memberikan motor dinas yang untuk memudahkan dan sangat membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas”.

4. Fasilitas kerjasama antar desa

Dengan adanya kerjasama antar unit pemerintahan desa ini setidaknya bisa mengembangkan kuitas sumber daya manusianya karena sangat besar

pengalaman yang bisa didapat. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Fasilitas yang dilakukan pihak Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.30: Jawaban responden terhadap Fasilitas kerjasama antar desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	19	37,3%
2.	Kadang-kadang	20	39,2%
3.	Tidak ada	12	23,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dilakukan oleh Camat Mempura diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 19 orang atau (37,3%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 20 orang atau (39,2%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 12 orang (23,5%), dan mayoritas responden menyatakan “kadang-kadang”.

Bedasarkan Wawancara kepada Camat pada hari Selasa 07/02/2012 jam 10.52 wib “ia menyatakan bahwa masih sulitnya mengumpulkan kepala desa dan masih terhalangnya oleh keterbatasan sarana dan prasarana semacam ruangan untuk melakukan pertemuan-pertemuan”. Alasan responden menyatakan Kadang-kadang karena sejauh ini masih jarang pertemuan-pertemuan dalam rangka kerjasama antar desa, padahal kerjasama antar desa bisa lebih mengarahkan kepada pencapaian tujuan otonomi desa dengan kerjasama antar desa diharapkan bisa saling membantu dan bertukar pikiran satu dengan yang lain dengan kerjasama juga bisa cepatnya terwujud tujuan otonomi daerah tersebut karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan.

5. Fasilitas ketentraman dan ketertiban

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan Responden mengenai Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel V.31: Jawaban responden terhadap Fasilitas ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	19	37,3%
2.	Kadang-kadang	23	45,1%
3.	Tidak ada	9	17,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dilakukan oleh Camat Mempura diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 19 orang atau (37,3%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 23 orang atau (45,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 9 orang (17,6%).

Dari hasil tanggapan responden tersebut menyatakan bahwa mayoritas responden mengatakan kadang-kadang yaitu sebanyak 23 orang atau (45,1%). Responden yang menyatakan jawaban tersebut beralasan bahwa masih minimnya fasilitas terhadap ketentraman dan ketertiban karena tidak adanya jadwal ronda bagi masyarakat dan masih sedikitnya poskamling-poskamling yang ada demi meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk mengetahui fasilitas yang ada untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum berupa poskamling-poskamling yang telah ada didirikan di setiap masing-masing desa di Kecamatan Mempura sejauh ini dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.32 : Upaya menjaga ketertiban dan keamanan

No	Desa	Poskamling	Keterangan
1.	Koto Ringin	3	1 tidak memadai
2.	Paluh	2	Tidak memadai
3.	Benteng Hilir	2	1 Tidak memadai
4.	Benteng Hulu	3	Tidak memadai
5.	Kp.Tengah	2	Tidak memadai
6.	Sei. Mempura	4	2 Tidak memadai
7.	Merempan Hilir	3	2 Tidak memadai
8.	Teluk Merempan	2	Tidak memadai

Sumber: Data Kecamatan Mempura, 2012

Bedasarkan tabel diatas diketahui bahwa masih banyak poskamling yang tidak beroperasi dan tidak memadai lagi atau banyak poskamling yang rusak, terkadang tidak jarang juga poskamling digunakan untuk tempat duduk-duduk yang mana sedikit demi sedikit membuat kerusakan dan pada akhirnya poskamling dalam keadaan tidak bagus lagi. Sejauh ini poskaling memang jarang beroperasi, kebanyakan jika sudah ada kemalingan baru membuat jadwal penjagaan poskamling untuk beroperasi. Padahal seharusnya poskamling harus beroperasi demi menjaga ketertiban dan ketentraman umum.

Demikianlah tanggapan responden mengenai sub-sub indikator dari Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak yang diperoleh dari responden berdasarkan penyebaran Quisioner penelitian.

Untuk mengetahui rekapitulasi masing-masing indikator dari Peranan Camat dalam Membina Administrasi pemerintahan desa dikecamatan mempura kabupaten siak dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

5.3. Rekapitulasi jawaban responden Dalam Setiap Indikator Variabel

Bedasarkan tanggapan responden tentang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak berdasarkan masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi berikut ini:

1. Mengenai Bimbingan

Tabel V.33: Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Bimbingan pada pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban		
		B	CB	KB
1.	Memberikan petunjuk	19	17	16
2.	Memberikan pengarahan	22	20	9
3.	Adanya pelatihan	14	27	10
4.	Adanya Rapat kerja	12	26	13
5.	Melakukan Evaluasi	11	30	10
Skor		77 (3)	120 (2)	58 (1)
Jumlah		231	240	58
Jumlah Skor		529		
Interval Skor		425-594 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari indikator Bimbingan dalam Pembinaan terhadap Administrasi Pemerintahan Desa dengan 5 (lima) sub indikator mendapat tanggapan responden yang telah ditetapkan bahwa yang menyatakan baik berjumlah 231, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 240, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 58.

Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Bimbingan dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura kabupaten Siak mendapat jumlah skor 529 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

2. Mengenai Supervisi

Tabel V.34: Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Supervisi pada pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban		
		B	CB	KB
1.	Pengawasan Langsung	8	22	21
2.	Pengawasan Tidak Langsung	19	23	9
3.	Pengawasan Kepala Desa	18	26	7
4.	Pengawasan Aparat Desa	11	22	18
5.	Pengawasan Tertib Administrasi	10	27	14
Skor		66 (3)	120 (2)	69 (1)
Jumlah		198	240	69
Jumlah Skor		507		
Interval Skor		425-594 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari indikator Supervisi dengan 5 (lima) sub indikator yang diteliti yaitu dengan mengadakan pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan terhadap kinerja kepala desa, pengawasan terhadap kinerja aparat desa dan pengawasan terhadap tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Dengan sub indikator tersebut diperoleh tanggapan responden yang menyatakan baik berjumlah 198, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 240, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 69.

Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Supervisi dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura kabupaten Siak mendapat jumlah skor 507 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

3. Mengenai Konsultasi

Tabel V.35 Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Konsultasi pada pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban		
		B	CB	KB
1.	Memberikan masukan	16	26	9
2.	Menerima keluhan	17	24	10
3.	Memberikan penjelasan	18	25	8
4.	Menjalin komunikasi	15	27	9
5.	Memberikan solusi	26	17	8
Skor		92 (3)	119 (2)	44 (1)
Jumlah		276	238	44
Jumlah Skor		558		
Interval Skor		425-594 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 5 (lima) sub indikator yang diteliti dari indikator Konsultasi yaitu memberikan masukan-masukan, menerima keluhan-keluhan, memberikan penjelasan, menjalin komunikasi yang baik, memberikan solusi-solusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini memperoleh tanggapan dari responden yang menyatakan baik berjumlah 276, kemudian responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 238, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 44.

Bedasarkan indikator Konsultasi dengan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Konsultasi dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak mendapat jumlah skor 558 dan yang mana dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

4. Pemberian Pedoman

Tabel V.36: Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Pemberian Pedoman pada pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban		
		B	CB	KB
1.	Memberikan petunjuk teknis	20	22	9
2.	Memberikan Buku-buku	18	27	6
3.	Menjelaskan pedoman	18	24	9
4.	Mamfaat pedoman	15	24	12
5.	Mendatangkan tanaga ahli	17	25	9
Skor		88 (3)	122 (2)	45 (1)
Jumlah		264	244	45
Jumlah Skor		553		
Interval Skor		425-594 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 5 sub indikator yang diteliti dari indikator Pemberian Pedoman yaitu gengan memberikan petunjuk teknis, memberikan buku-buku, menjelaskan pedoman yang diberikan, mamfaat pedoman yang didapat dan mendatangkan tenaga ahli dalam menjelaskan pedoman yang diberikan. Dari sub indikator tersebut didapat tanggapan responden yang menyatakan baik berjumlah 264, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 244, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 45.

Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, dari indikator pemberian pedoman, maka dapat diketahui bahwa indikator Pemberian Pedoman dalam Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura kabupaten Siak mendapat jumlah skor 553 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

5. Mengenai Fasilitas

Tabel V.37: Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Fasilitas pada pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban		
		B	CB	KB
1.	Fasilitas tata administrasi	16	23	12
2.	Fasilitas penyusunan peraturan desa	15	27	9
3.	Fasilitas kepala desa	21	20	10
4.	Fasilitas Kerjasama antar desa	19	20	12
5.	Fasilitas ketentraman dan ketertiban	19	23	9
Skor		91 (3)	112 (2)	52 (1)
Jumlah		273	224	52
Jumlah Skor		549		
Interval Skor		425-594 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 5 sub indikator yang diteliti dari indikator Fasilitas yaitu fasilitas tata administrasi, fasilitas penyusunan peraturan desa, fasilitas kepala desa, fasilitas kerjasama antar desa, fasilitas ketentraman dan ketertiban. Dari sub indikator tersebut Memproleh tanggapan dari responden bahwasannya yang menyatakan baik berjumlah 273, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 224, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 52.

Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas maka dapat diketahui bahwa hasil penghitungan dari indikator Fasilitas dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak mendapat jawaban dengan jumlah skor keseluruhan 549 dan yang mana dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

Kemudian untuk mengetahui secara keseluruhan hasil analisis Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel V.38 Rekapitulasi Jawaban Responden Seluruh indikator tentang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban		
		B	CB	KB
1.	Bimbingan	231	240	58
2.	Supervisi	240	222	64
3.	Konsultasi	276	238	44
4.	Pemberian Pedoman	264	244	45
5.	Fasilitasi	273	244	52
Skor		1284	1168	263
Jumlah Skor : Jumlah Sub Indikator		2715 : 5		
Jumlah Skor Rata-Rata		543		
Interval Skor		425-594 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 5 indikator yang diteliti yaitu Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Pemberian Pedoman, dan fasilitasi dengan 51 orang responden diperoleh tanggapan responden yang menyatakan baik dengan skor 1284, kemudian responden yang menyatakan Cukup Baik skornya 1168, dan yang menyatakan Kurang Baik skornya 263.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat diketahui bahwa Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak mendapatkan jumlah skor rata-rata 543 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi cara berfikir seseorang, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, pola fikir dan wawasan yang dimilikinya. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.1 Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Lulusan SMP	13	25,5%
2.	Lulusan SMA	30	58,8%
3.	Lulusan Diploma	2	3,9%
4.	Lulusan S1	4	7,8%
5.	Lulusan S2	2	3,9%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang terbanyak dari responden yaitu pada tingkat SMA sebanyak 30 orang atau 58,8%. Selanjutnya pada tingkat SMP sebanyak 13 orang atau 24,5%, lulusan S1 4 orang

atau 7,8%, sementara lulusan S2 2 orang atau 3,9%, dan Diploma 2 orang atau 3,9%.

Dari penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah pada pendidikan SMA dengan 30 orang responden atau 58,8% dan yang terkecil adalah Diploma dengan jumlah 2 orang atau 3,9%. Hal ini menunjukkan beragam tingkat pendidikan responden dan beragam pula jawaban yang akan didapat dari masing-masing responden.

b. Tingkat Umur

Umur merupakan salah satu yang dapat menentukan kematangan seseorang. Semakin tinggi umur seseorang, maka dinilai semakin dewasa dalam menyikapi setiap fenomena karena telah banyaknya pengalaman yang mereka peroleh. Dari karakteristik responden berdasarkan umur yang menjadi responden dapat diketahui sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.2 Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Umur/Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21-30 tahun	15	29,4%
2.	31-40 tahun	22	43,1%
3.	51 Tahun Keatas	14	27,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden terbanyak adalah pada tingkat 31-40 tahun sebanyak 22 orang atau 43,1%. Kemudian diikuti responden pada tingkat 21-30 tahun sebanyak 15 orang atau 29,4%, dan tingkat umur responden terendah pada tingkat 51 tahun keatas sebanyak 14 orang atau 27,5%.

Hal ini menunjukkan sebagian responden pada penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa dalam berfikir. Sehingga dalam menilai sesuatu tidak lagi mudah dipengaruhi orang lain sehingga responden dapat menilai dengan baik.

c. Jenis Kelamin

Jenis kelamin dinilai perlu untuk dijadikan bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintah. Untuk mengetahui jenis kelamin responden, dapat diketahui sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.3 Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	43	84,3%
2.	Perempuan	8	15,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 51 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 43 orang (84,3%), dan perempuan 8 orang (15,7%). Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan yang menyelenggarakan pemerintahan desa lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.

d. Masa Kerja

Masa kerja sangat mempengaruhi pada tingkat pemahaman akan pekerjaan bagi seseorang, semakin lama seseorang bekerja maka semakin banyak pengetahuannya pada bidang pekerjaannya, semakin lama seseorang bekerja semakin banyak pengalaman kerja yang didapat sehingga bisa melakukan yang terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Tabel V.4 Jumlah Responden berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1.	1-3 tahun	21	41,2%
2.	4-6 tahun	18	35,3%
3.	6-9 tahun	5	9,8%
4.	Diatas 10 tahun	7	13,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Berdasarkan tabel diatas jumlah responden yang memiliki masa kerja 1-3 tahun sebanyak 21 orang atau 41,2%, responden yang memiliki masa kerja 18 orang atau 35,3%, selanjutnya yang memiliki masa kerja diatas 10 tahun ada 7 orang atau 13,7% kemudian 5 orang atau 9,8% yang memiliki masa kerja 6-9 tahun.

Lamanya seseorang dalam menempati suatu pekerjaan sangat menentukan pengalaman seseorang dalam bekerja, dimana seseorang yang sudah lama menjalani suatu pekerjaan akan lebih mengerti dan mempunyai pengalaman yang besar dalam menjalankan pekerjaan untuk seterusnya.

5.2. Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa diKecamatan Mampura Kabupaten Siak.

Pembinaan organisasi bermaksud untuk mengembangkan individu-individu, kelompok, dan atau seluruh sistem dalam organisasi secara keseluruhan. pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagai mana mestinya.

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dalam melakukan pekerjaan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan pekerjaan maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa sebagai penggerak atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam mencapai berbagai keberhasilan pembangunan.

Camat secara umum memimpin penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintahan di desa maupun pemerintahan kelurahan, tugas pembangunan dan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan koordinasi atas instansi vertical. Sebagai pejabat Pembina pemerintahan desa seharusnya camat mempunyai program pembinaan supaya pembinaan yang dilakukan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintahan desa, agar pembinaan bisa berjalan dengan baik maka program pembinaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan.
2. Supervisi.
3. Konsultasi.
4. Pemberian pedoman.
5. Fasilitasi.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasannya yang memberikan pembinaan itu adalah camat dan stafnya sedangkan yang dibina itu adalah aparat pemerintahan desa. Adapun hasil penelitian penulis tentang peranan camat dalam membina administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak berdasarkan pada indikatornya yaitu:

a. Bimbingan

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal. Dengan adanya bimbingan diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada serta bisa meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan agar tujuan bisa tercapai seperti yang diinginkan. Untuk melakukan bimbingan itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah:

1. Memberikan Petunjuk

Memberikan petunjuk dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap aparatur desa sangatlah perlu, karena masih banyaknya tugas-tugas yang belum mereka pahami dalam menertibkan administrasi pemerintahan desa.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pemberian petunjuk yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.5: Jawaban responden tentang pemberian petunjuk terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	18	35,3%
2.	Kadang-kadang	17	33,3%
3.	Tidak ada	16	31,3%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 18 orang atau 35,3% menjawab “Ya” sedangkan responden menjawab “Kadang-Kadang” 17 orang atau 33,3% dalam adanya pemberian petunjuk guna kelancaran tugas-tugas yang dijalankan, dan 16 orang atau 31,3% menjawab “Tidak Ada” sehingga dapat diketahui bahwa Camat Mempura Ada memberikan petunjuk kepada aparatur Desa dalam menjalankan Roda Pemerintahannya.

Tanggapan responden yang terbanyak adalah 18 orang atau 35,5% yang mana mayoritas mereka mengatakan bahwa ada petunjuk yang diberikan oleh pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan tugas yang belum mereka pahami disamping itu berdasarkan Wawancara Kepada Kepala Desa Koto Ringin pada tanggal 20/02/2012 jam 12.28 wib, “ia mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas mereka camat sudah memberikan petunjuk untuk menjalankan tugas-tugas yang dilakukan aparatur desa agar pemerintah desa bisa menjalankan pemerintahannya dengan benar”.

Pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan tugas pemerintah desa memang menjadi tugas pemerintah kecamatan yang mana petunjuk tidak hanya diberikan oleh camat melainkan semua staf yang ada dipemerintah kecamatan yang dianggap memahami permasalahan atau penyelenggaraan tugas pemerintah desa bisa melalui Sekcam ataupun Kepala Seksi yang ada.

2. memberikan pengarahan

Pengarahan sangat dibutuhkan oleh aparat desa terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa karena dengan pengarahan bisa melaksanakan tugas lebih

baik lagi. Tanggapan responden tentang langkah “Memberikan Pengarahan” pada tabel berikut ini.

Tabel V.6: Jawaban responden tentang memberikan pengarahan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	22	43,1%
2.	Kadang-kadang	20	39,2%
3.	Tidak ada	9	17,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan dengan cara memberikan pengarahan kepada apatur pemerintahan Desa dalam melaksanakan roda pemerintahanya diketahui 22 responden atau 43,1% yang menjawab “Ya” sedangkan 20 responden atau 39,2% menjawab “Kadang-Kadang” dan 9 orang atau 17,7% yang menjawab “Tidak ada”.

Mayoritas responden menjawab Ya dengan frekuensi 22 orang atau 43,1% yang mana pemerintah kecamatan memberikan pengarahan-pengarahan terhadap peenyelenggaraan tugas menurut Wawancara kepada Camat Mempura pada hari Selasa 07/02/2012 jam 10.52 wib, “pengarahan-pengerahan pasti diberikan jika pemerintah desa kurang memahami dalam pelaksanaan tugasnya”.

3. Adanya Pelatihan

Pelatihan sangat menunjang kinerja dan prestasi kerja karena dengan pelatihan akan mendapatkan pendidikan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dipemerintahan desa untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dan arti pentingnya penataan tertib

administrasi desa tersebut. Kemudian tanggapan responden tentang langkah “Pemberian Pelatihan” yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan.

Tabel V.7: Jawaban responden tentang Pemberian Pelatihan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	14	27,5%
2.	Kadang-kadang	27	52,9%
3.	Tidak ada	10	19,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 14 orang atau 27,5% menjawab “Ya” sedangkan responden yang menjawab “Kadang-Kadang” 27 orang atau 52,9% dan 10 orang atau 19,6% menjawab “Tidak Ada” sehingga dapat diketahui bahwa Camat Mempura hanya kadang-kadang memberikan Pelatihan kepada aparatur Desa dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada.

Mayoritas responden menjawab kadang-kadang yaitu sebanyak 27 orang atau 52,9%. Hanya kadang-kadang pelatihan yang mereka ikuti, padahal pelatihan bisa meningkatkan kualitas aparatur penyelenggaraan pemerintah karena dengan diadakannya pelatihan-pelatihan akan lebih meningkatkan pemahaman dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah itu bisa tercapai karena diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang handal.

Sejauh ini Adapun pelatihan yang pernah diikuti oleh aparat desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan roda pemerintahannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.8. Kegiatan Pelatihan dalam rangka Pembinaan yang diikuti oleh Aparatur Pemerintah Desa.

N O	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Pembina	Ket
1.	Th. 2008	Pelatihan tata cara pelaksanaan APB Desa dan SPJ ABB desa	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	Sudah
2.	Th.2009	Pelatihan manajemen bagi Kaur. Pem desa.	Kaur. Pem	Camat dan instansi terkait	Sudah
		Pelatihan pemerintah desa dalam bidang pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa, Sekdes	Camat dan instansi terkait	Sudah
3.	Th.2010	-	-	-	Belum
4.	Th. 2011	Pelatihan fasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha kecil makro dan menengah	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	Sudah

Sumber Data: Kecamatan Mempura Kabupaten Siak 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat sejauh ini program pelatihan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tidak menjurus pada peningkatan tata administrasi pemerintahan desa, sementara pelatihan tata penyelenggaraan administrasi sangat dibutuhkan oleh pemerintahan desa karena itu merupakan tugas sehari-hari dan yang menentukan prospek otonomi desa adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya maka dari itu diperlukan pelatihan terhadap penyelenggara pemerintah desa.

4. Adanya Rapat kerja

Dengan diadakan rapat kerja maka permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing penyelenggaraan pemerintah desa bisa dikemukakan dan dipecahkan bersama-sama, dan bisa menunjang perbaikan kinerja aparat desa satu dengan yang lainnya. Adapun tanggapan responden terhadap adanya Rapat Kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.9: Jawaban responden tentang adanya rapat kerja dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	12	23,5%
2.	Kadang-kadang	26	51,0%
3.	Tidak ada	13	25,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan dengan cara mengadakan rapat kerja bersama apatur pemerintahan Desa dalam melaksanakan roda pemerintahanya diketahui 12 responden atau 23,5% yang menjawab “Ya” sedangkan 26 responden atau 51,0% menjawab “Kadang-Kadang” dan 13 orang atau 25,5% yang menjawab “Tidak ada”.

Mayoritas responden menjawab kadang -kadang pemerintah kecamatan mengadakan rapat kerja. Sementara rapat kerja ini sangat memicu untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kinerja yang telah dilakukan selama ini bagi pemerintah desa. Bedasarkan Wawancara Kepada kepala desa Benteng Hilir pada hari Senin 20/02/2012 jam 09.45 wib, “Camat hampir tidak ada melakukan Rapat Kerja, padahal itu semua sangat menunjang kinerja dan memicu untuk melakukan perbaikan-perbaikan”.

Dengan mengadakan rapat kerja dan mengumpulkan aparat desa sebenarnya sangat membantu penyelenggaraan pemerintah desa, dimana dengan itu bisa melakukan perbaikan-perbaikan, bisa saling bertukar pikiran dan menilai kinerja dari masing-masing desa agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.

5. Melakukan Evaluasi

Melakukan Evaluasi “Penilaian” terhadap kinerja pemerintah desa juga bisa meningkatkan semangat kerja, dengan adanya penilaian diharapkan membimbing agar termotivasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi. Kemudian tanggapan responden terhadap adanya Evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.10: Jawaban responden tentang melakukan Evaluasi kerja pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	11	21,6%
2.	Kadang-kadang	30	58,8%
3.	Tidak ada	10	19,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan dengan cara melakukan Evaluasi terhadap kinerja apatur pemerintahan Desa dalam melaksanakan roda pemerintahanya diketahui 11 responden atau 21,6% yang menjawab “Ya” sedangkan 30 responden atau 58,8% menjawab “Kadang-Kadang” dan 10 orang atau 19,6% yang menjawab “Tidak ada”.

Berdasarkan uraian tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap evaluasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap kepala desa evaluasi yang dilakukan pemerintah kecamatan

mendapat jawaban 30 responden atau 58,8% yang menyatakan kadang-kadang . Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Sekretaris Camat Mempura pada hari Kamis, 02/02/2012 jam 10.27 wib, “bahwasannya pihak kecamatan telah melakukan evaluasi ketika akan dan setelah diadakannya alokasi untuk desa”. Dengan diadakannya evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa ini sebenarnya bisa lebih meningkatkan kegairahan dan semangat kerja perangkat desa, dengan adanya penilaian tersebut akan menimbulkan keinginan untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya karena adanya penilaian terhadap sebuah pekerjaan tersebut.

b. Supervise

Untuk tercapainya efektifitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu diadakan suatu tindakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang akan mengawasi jalannya administrasi yang akan diberikan oleh pemerintahan kepada para aparaturnya.

Dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia dikenal adanya pengawasan umum, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung masing-masing staf. Adapun sub indikator dari supevisi yang dilakukan terhadap adminisrtasi pemerintahan desa dapat dilihat pada penilaian sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yang dilakukan langsung oleh atasan memengang sangat membawa pengaruh terhadap kinerja bawahan, dengan adanya pengawasan langsung bisa meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang ada. Untuk

mengetahui sejauh mana tanggapan responden terhadap hasil Pengawasan Langsung yang dilakukan Camat terhadap Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak akan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.11: Jawaban Responden tentang Pengawasan Langsung yang dilakukan terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	8	15,6%
2.	Kadang-kadang	22	43,1%
3.	Tidak ada	21	41,2%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Supervisi yang dilakukan oleh Camat Mempura Kabupaten Siak dengan cara Pengawasan Langsung ketempat kerja dalam rangka untuk meninjau kinerja pemerintahan desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 8 orang atau (15,6%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 22 orang atau (43,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 21 orang (41,2%).

Dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap Pengawasan langsung yang dilakukan oleh pihak Kecamatan mendapat jawaban kadang-kadang sebanyak 22 orang atau (43,1%) . Menurut Wawancara yang dilakukan oleh peneliti Kepala Desa Benteng Hulu (Selasa 14/02/2012;09.25) dan Merempan Hilir (Kamis 09/02/2012;10.05) “menyatakan bahwa pemerintah kecamatan masih terkesan jarang dalam melakukan pengawasan langsung turun kedesda dalam rangka pengawasan terhadap tertib administrasi desa. Padahal

pengawasan langsung ini sangat bermamfaat dan bisa meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam menata administrasi pemerintahan”.

Pengawasan langsung sangat menunjang pelaksanaan tugas aparat desa karena peranan seorang atasan sangatlah dipatuhi oleh bawahan, sehingga dengan pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan sangat menentukan dan menjadikan sebuah pekaerjaan yang berdaya guna dan berhasil guna. Karena peran pemimpin sangatlah kuat dalam penyelenggaraan pemerintah menuju terwujudnya tujuan otonomi.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Kemudian tanggapan responden tentang supervise dengan melakukan Pengawasan tidak langsung dengan memintai laporan tentang kondisi penduduk dan kinerja Pemerintahan Desa pada tabel berikut ini.

Tabel V.12: Jawaban responden tentang Pengawasan Tidak langsung terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	19	37,3%
2.	Kadang-kadang	23	45,1%
3.	Tidak ada	9	17,6%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Tabel diatas menjelaskan tanggapan responden tentang Supervisi yang dilakukan oleh Camat dengan Pengawasan Tidak Langsung dengan meminta laporan diketahui bahwa 19 orang responden atau (37,3%) yang menjawab “Ya”, 23 orang atau (45,1%) yang menjawab “Kadang-kadang” dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 9 orang atau (17,6%).

Pengawasan tidak langsung juga bisa membantu tertib penataan administrasi desa, yang mana dengan pengawasan tidak langsung pihak kecamatan bisa mengetahui perkembangan-perkembangan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Sejauh ini untuk Pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan kependudukan setiap bulannya sudah dilaksanakan oleh pihak kecamatan, dimana setiap desa harus menyerahkan laporan kependudukannya kepada pihak kecamatan. berdasarkan Wawancara kepada Sekcam Mempura pada hari Kamis 02/02/2012 jam 10.27 “ia mengatakan bahwa jika Pemerintah Desa tidak menyerahkan laporan kependudukannya maka pihak kecamatan akan Menyurati agar menyerahkan laporan kependudukannya”.

3. Pengawasan terhadap Kepala Desa

Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden mengenai Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap kinerja kepala desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.13: Jawaban Responden tentang pengawasan terhadap kepala desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	18	35,3%
2.	Kadang-kadang	26	51,0%
3.	Tidak ada	7	13,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Supervisi yang dilakukan oleh camat mempura kabupaten Siak dengan cara Pengawasan Langsung

ketempat kerja dalam rangka untuk meninjau kinerja pemerintahan desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 18 orang atau (35,3%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 26 orang atau (51,0%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 7 orang (13,7%).

Berdasarkan uraian tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap kepala desa mayoritas mendapat jawaban kadang-kadang sebanyak 26 orang atau (51,0%). Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti Kepala Desa Benteng Hilir pada hari Senin 20/02/2012 jam 09.45 wib “mengatakan bahwa sejauh ini pihak kecamatan hanya meminta laporan kependudukan setiap bulannya. Sementara untuk laporan harian kerja kepala desa tidak pernah diminta untuk melaporkan dan sejauh ini oleh camat padahal dengan itu bisa membantu camat untuk mengetahui kinerja Kepala Desa”.

Dengan meminta laporan harian kerja sebenarnya sudah sedikit membantu pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, karena sedikit banyaknya bisa mengetahui bagaimana kinerja kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa.

4. Pengawasan terhadap Aparatur Desa

Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap aparatur yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.14: Jawaban Responden tentang pengawasan terhadap Aparatur desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	11	21,6%
2.	Kadang-kadang	22	43,1%
3.	Tidak ada	18	35,3%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Supervisi yang dilakukan oleh camat mempura kabupaten Siak dengan sub indikator melakukan pengawasan terhadap aparatur desa ditempat kerja dalam rangka untuk meninjau kinerja pemerintahan desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 11 orang atau (21,6%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 22 orang atau (41,3%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 18 orang (35,3%).

Berdasarkan uraian tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap kepala desa mendapat jawaban kadang-kadang dengan sebanyak 22 orang atau (41,3%). Menurut Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala Desa Teluk Merempan hari Senin 13/02/2012 jam 10.29 wib, “bahwasannya pihak kecamatan masih jarang turun kedesa-desa untuk melihat bagaimana perkembangan aparat penyelenggaraan pemerintahan desa padahal jika melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur desa mereka pasti akan bekerja lebih baik lagi, dengan adanya pengawasan sebenarnya bisa meningkatkan kualitas kerja seseorang dan membangkitkan semangat kerja”.

Pada dasarnya Pengawasan terhadap aparat desa sangatlah perlu dilakukan karena Aparat desa merupakan subjek penggerak dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan sumber daya manusia haruslah baik, dalam pengertian moral dan kapasitasnya karena keberhasilan pencapaian tujuan tidak terlepas dari kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya.

5. Melakukan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.15: Jawaban Responden tentang pengawasan terhadap pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	10	19,6%
2.	Kadang-kadang	27	52,9%
3.	Tidak ada	14	27,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh camat mempura kabupaten Siak dalam rangka untuk meninjau pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 10 orang atau (19,6%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 27 orang atau (52,9%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 14 orang (27,5%).

Berdasarkan uraian tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab pengawasan terhadap tertib

administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh pihak Kecamatan mendapat jawaban kadang-kadang yaitu sebanyak 27 orang atau (52,9%).

Administrasi di pemerintahan desa sangatlah vital dimana segala urusan surat menyurat, tanah, jual beli dan system prosedur dilaksanakan disana. Pengawasan sangatlah dibutuhkan dalam penertiban administrasi pemerintahan desa karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat data yang terkandung didesa tidak hanya berguna bagi pembangunan desa tetapi bagi pembangunan bangsa dan menjadi tolak ukur untuk meratakan pembangunan desa karena desa merupakan integral dari pembangunan bangsa.

c. Konsultasi

Konsultasi merupakan sebuah pertemuan/konvarensi untuk saling bertukar informasi dan saran. Dengan adanya konsultasi pemerintah desa bisa mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan adanya komunikasi yang baik maka proses konsultasi ini tidak akan sulit dilaksanakan.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai konsultasi dapat dinilai melalui sub indikator yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Pemberian Masukan

Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden mengenai pemberian masukan terhadap aparatur pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dapat dilihat berikut ini.

Tabel V.16: Jawaban Responden tentang Konsultasi berupa Pemberian Masukan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	16	31,4%
2.	Kadang-kadang	26	51,0%
3.	Tidak ada	9	17,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pemberian masukan yang dilakukan oleh pihak kecamatan kepada aparatur desa agar bisa memahami dengan baik tugas-tugas yang diberikan dalam menjalankan administrasi pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 16 orang atau (31,4%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 26 orang atau (51,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 9 orang atau (17,6%).

Dapat diketahui mayoritas responden menjawab kadang-kadang yaitu sebanyak 26 orang atau (51,1%), bedasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Benteng Hulu pada hari Senin 14/02/2012 jam 09.25 wib untuk sub indikator konsultasi ini, “ia menyatakan bahwa terkadang masih sulitnya untuk bertemu dengan camat karena masing-masing antara camat dan kepala desa mempunyai kesibukan tersendiri dalam pekerjaannya”.

2. menerima keluhan

Kemudian tanggapan responden tentang penilaian “Menerima Keluhan” dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel V.17: Jawaban responden tentang Konsultasi dengan menerima keluhan dari Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	17	33,3%
2.	Kadang-kadang	24	47,1%
3.	Tidak ada	10	19,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pihak kecamatan dalam Menerima Keluhan dari pemerintahan Desa jika ada kendala-kendala dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 17 orang atau (33,3%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 24 orang atau (47,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 10 orang atau (19,6%).

Maka dapat diketahui mayoritas responden menjawab kadang-kadang, dengan alasan yang sama yaitu masih sulitnya untuk bertemu dengan camat, menurut wawancara kepada kepala desa Paluh pada hari Selasa 21/02/2012 jam 10.46 wib” bahwasannya jika bertemu camat untuk melakukan konsultasi beliau pasti akan menerima keluhan-keluhan pelaksanaan kerja dan dan memberikan jalan keluarnya terhadap kesulitan kerja yang dialami oleh pemerintah desa”.

3. Memberikan Penjelasan

Selanjutnya sub indikator dari konsultasi yaitu berupa memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kesulitan kerja yang dihadapi pemerintah desa. tanggapan responden tentang “Memberikan Penjelasan” maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.18: Jawaban responden tentang konsultasi dengan memberikan penjelasan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	18	15,7%
2.	Kadang-kadang	25	45,1%
3.	Tidak ada	8	39,2%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pihak kecamatan dalam Memberikan Penjelasan Kepada pemerintahan Desa jika ada tugas-tugas yang belum mereka pahami dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 18 orang atau (35,3%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 25 orang atau (49,0%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 8 orang atau (15,7%).

Bedasarkan hasil dari tanggapan responden tersebut diketahui bahwa mayoritas responden menjawab Kadang-kadang yaitu sebanyak sebanyak 25 orang atau (49,0%).

Memberikan penjelasan-penjelasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa merupakan tugas yang melekat bagi pihak kecamatan dimana masik banyak aparat desa yang belum memahami pelaksanaan tugasnya dengan jelas. Penjelasan diharapkan bisa mengurangi angka kesalahan dapal pelaksanaan tusas pemerintah desa.

1. Menjalin Komunikasi

Kemudian tanggapan responden tentang penilaian “Menjalin komunikasi” dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel V.19: Jawaban responden tentang Konsultasi dengan menjalin komunikasi yang baik dari Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	15	29,4%
2.	Kadang-kadang	27	52,9%
3.	Tidak ada	9	17,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa camat dalam menjalin komunikasi dengan pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 15 orang atau (29,4%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 27 orang atau (52,9%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 9 orang atau (17,7%).

Maka dapat diketahui mayoritas responden menjawab kadang-kadang, dengan alasan masih belum optimalnya komunikasi yang terjalin. Berdasarkan Wawancara kepada kepala desa Benteng Hilir pada hari Senin 20/02/2012 jam 09.45 “bahwasannya komunikasi dengan camat selama ini memang belum terjalin dengan baik karena adanya kesibukan masing-masing dan sulitnya untuk bertemu Camat, Terkadang untuk acara desa saja Camat diundang tidak datang, Begitulah pernyataannya kepada peneliti. Pada dasarnya komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, dengan komunikasi yang baik maka akan mendapatkan hasil yang baik.

2. Memberikan Solusi

Kemudian tanggapan responden tentang penilaian “Pemberian solusi” dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel V.20: Jawaban responden tentang memberikan Solusi kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	17	33,3%
2.	Kadang-kadang	24	47,1%
3.	Tidak ada	10	19,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pihak kecamatan dalam Menerima Keluhan dari pemerintahan Desa jika ada kendala-kendala dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 17 orang atau (33,3%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 24 orang atau (47,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 10 orang atau (19,6%).

Maka dapat diketahui mayoritas responden menjawab kadang-kadang yaitu sebanyak 24 orang atau (47,1%). Karena masih ada yang beranggapan sulitnya untuk bertemu dengan camat untuk berkonsultasi.

d. Pemberian Pedoman

Dalam menyelenggarakan sebuah tanggung jawab memang diperlukan pedoman sebagai acuan untuk melaksanakan tugas agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Pedoman bisa berupa Buku, undang-undang, juknis dan lain-lain. Untuk melihat bagaimana pedoman yang diberikan oleh camat kepada pemerintahan desa dapat dilihat pada penilaian berikut ini:

1. Memberikan Petunjuk Teknis

Tabel V.21: Jawaban responden tentang Pemberian petunjuk teknis sebagai pedoman kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	20	39,2%
2.	Kadang-kadang	22	43,1%
3.	Tidak ada	9	17,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Bedasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemberian Pedoman yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dalam rangka Pembinaan terhadap Administrasi Pemerintahan Desa diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 20 orang atau (39,2%) yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 22 orang atau (43,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 9 orang atau (17,6%).

Dari hasil diatas mayoritas responden menjawab kadang-kadang yaitu sebanyak 22 orang atau (43,1%). Bedasarkan wawancara Kepada Kepala Desa Merempan Hilir pada hari Senin 13/02/2012 jam 10.29 wib ”sejauh ini pemerintah kecamatan memberikan memberikan berupa PERDA, Juknis sebagai pegangan dalam menjalankan tugas yang mana diharapkan bisa membantu pelaksanaan tugas pemerintah desa”.

2. Memberikan buku-buku

tanggapan responden mengenai pemberian buku-buku yang bisa membantu ataupun menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang

diberikan kepada pemerintahan desa untuk mengetahui tanggapan responden mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.22: Jawaban responden tentang pemberian buku-buku sebagai pedoman yang diberikan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	17	33,3%
2.	Kadang-kadang	25	49,0%
3.	Tidak ada	9	17,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa manfaat yang didapat oleh responden terhadap Pedoman-Pedoman yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan kepada apatur pemerintahan Desa agar ada acuan dalam melaksanakan pemerintahannya diketahui 17 responden atau 33,3% yang menjawab “Ya” sedangkan 25 responden atau 49,0% menjawab “Kadang-Kadang” dan 9 orang atau 17,7% yang menjawab “Tidak ada”.

Dari jawaban responden diatas mayoritas mengatakan kadang-kadang yaitu sebanyak 25 responden atau 49,0%. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Paluh pada hari Selasa 14/02/2012 jam 09.25 “bahwasannya dalam pemberian buku-buku sebagai petunjuk pemerintah desa menjalankan roda pemerintahannya sejauh ini masih jarang yang ada yaitu berupa pemberian PERDA, undang-undang, dan keputusan-keputusan bupati”.

Pemberian buku-buku pada dasarnya bisa menunjang dan meningkatkan pemahaman tentang arti sebuah pekerjaan, karena banyak mamfaat yang bisa diambil dengan membaca buku dengan tidak adanya pemberian buku-buku tentang penyelenggaraan pemerintahan desa maka kinerja dari aparat desa tidak

bisa diharapkan untuk bisa lebih baik karena pemberian buku juga bisa membantu dan menambah pemahaman mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Menjelaskan Pedoman yang diberikan

Selanjutnya tanggapan responden mengenai menjelaskan pedoman yang diberikan kepada pemerintah desa, karena tidak dengan mudahnya untuk memahami berbagai pedoman yang diberikan untuk membantu dalam memahami tugas dan fungsi yang diemban selanjutnya akan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel V.23: Jawaban responden tentang upaya menjelaskan mengenai Pedoman yang diberikan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	13	25,5%
2.	Kadang-kadang	26	51,0%
3.	Tidak ada	12	23,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pihak kecamatan dalam Memberikan Penjelasan terhadap Pedoman yang diberikan Kepada pemerintahan Desa sebagai panduan dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 13 orang atau (25,5%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 26 orang atau (51,0%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 12 orang atau (23,5%).

Dari uraian diatas mayoritas responden mengatakan kadang-kadang dengan alasan petunjuk yang diberikan hanya kadang-kadang yang mendapatkan penjelasan terlebih terdahulu. Menurut Wawancara kepada Camat hari Selasa 07/02/2012 jam 10.52 “ia mengatakan bahwa jika pedoman yang diberikan ada yang tidak dipahami bisa langsung menanyakannya kepada pemerintahan

kecamatan, jika sebuah pedoman tersebut dikira perlu mendatangkan tenaga ahli maka akan dilaksanakan dengan demikian”.

4. Mamfaat Pedoman

Selanjutnya adalah tanggapan responden mengenai mamfaat yang didapat dari pemberian pedoman yang diberikan tersebut. Untuk mengetahui jawaban reponden mengenai penilaian terhadap sub indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.24: Jawaban responden terhadap mamfaat yang didapat dari pedoman yang diberikan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	18	35,3%
2.	Kadang-kadang	24	47,1%
3.	Tidak ada	9	17,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa manfaat yang didapat oleh responden terhadap Pedoman-Pedoman yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan kepada apatur pemerintahan Desa agar ada acuan dalam melaksanakan pemerintahannya diketahui 18 responden atau 33,3% yang menjawab “Ya” sedangkan 24 responden atau 47,1% menjawab “Kadang-Kadang” dan 9 orang atau 17,6% yang menjawab “Tidak ada”.

Mayoritas responden menjawab kadang-kadang yang mana 24 responden atau 47,1%. Adapun alasan responden yang menyatakan demikian adalah bahwasannya petunjuk tersebut tidaklah cukup membantu pelaksanaan tugas, karena masih banyak yang belum mengerti dengan cara pemberian petunjuk-petunjuk tersebut.

5. Mendatangkan Tenaga Ahli

Dalam pemberian pedoman berupa peraturan-peraturan ataupun sosialisasi peraturan-peraturan bisa dilakukan dengan mendatangkan tenaga ahli untuk menjelaskan perihal tersebut, agar tidak adanya kesalah pahaman terhadap pedoman yang diberikan dan penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik lagi.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai mendatangkan tenaga ahli dalam memberikan Penjelasan terhadap pedoman akan dijelaskan berikut ini.

Tabel V.25: Jawaban responden tentang mendatangkan tenaga ahli untuk menjelaskan Pedoman yang diberikan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	15	29,4%
2.	Kadang-kadang	24	47,1%
3.	Tidak ada	12	23,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pihak kecamatan dalam Memberikan Penjelasan terhadap Pedoman yang diberikan Kepada pemerintahan Desa sebagai panduan dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 15 orang atau (29,4%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 24 orang atau (47,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 12 orang atau (23,5%).

Dari uraian diatas diketahui bahwa mayoritas responden menjawab kadang-kadang sebanyak 24 orang atau (47,1%). Dengan alasan bahwa tidak semua pedoman yang diberikan didatangkan tenaga ahli untuk menjelaskan atau mensosialisasikannya. Berdasarkan Wawancara Kepada Kasi Pemerintahan pada

hari Senin 06/02/2012 jam 09.47 wib “terkadang pedoman yang diberikan memang mendatangkan orang yang ahli jika dibutuhkan untuk menjelaskannya seperti masalah kependudukan, akan mendatangkan dari Dinas kependudukan untuk melakukan sosialisasinya. Jika tidak diperlukan maka cukup dengan menayakan kepada pihak kecamatan”.

b. Fasilitasi

Fasilitasi merupakan upaya memudahkan tugas dan fungsi yang diemban kepada pemerintah desa. Untuk melihat proses fasilitasi yang dilakukan oleh camat dengan penilaian dari sub indikator akan dijelaskan pada penjelasan dibawah ini.

1. Fasilitasi Tata Administasi

Sehubung dengan tanggapan responden mengenai fasilitasi Tata Administrasi dikecamatan mempura maka dapat dilihat pada tabel berikut ini tata.

Tabel V.26: Jawaban responden terhadap Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	15	29,4%
2.	Kadang-kadang	27	52,9%
3.	Tidak ada	9	17,7%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh camat mempura kabupaten Siak diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 15 orang atau (29,4%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 27 orang atau (52,9%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 9 orang (17,7%).

Hasil tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa fasilitasi tata administrasi mendapat meyoritas jawaban kadang-kadang sebanyak 27 orang atau (52,9%) dengan alasan masih minimnya sarana dan prasarana yang padahal hal tersebut sangat menunjang pelaksanaan tata administrasi pemerintahan desa. adapun sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan tata administrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.27: Sarana dan Prasarana pendukung penyelenggaraan Administrasi

No	Desa	Computer	Filling Kabinet	Mesin ketik	Mesin jenset
1.	Koto Ringin	1 unit (baik)	1 unit (baik)	2 (baik)	1 (baik)
2.	Paluh	1 unit (baik)	1 unit (baik)	1 (baik)	1 (baik)
3.	Benteng Hilir	1 unit (baik)	1 unit (baik)	1 (baik)	1 (baik)
4.	Benteng Hulu	2 unit (baik)	1 unit (kurang baik)	1 (baik)	1 (baik)
5.	Kp.Tengah	2 unit (baik)	1 unit (baik)	1 (baik)	1 (baik)
6.	Sei. Mempura	2 unit (baik)	1 unit (kurang baik)	1 (baik)	1 (baik)
7.	Merempan Hilir	1 unit (baik)	1 unit (kurang baik)	2 (baik)	1 (baik)
8.	T. Merempan	1 (Laptop)	1 unit (Kurang baik)	2 (baik)	1 (baik)

Sumber: Data Kecamatan Mempura, 2012

Bedasarkan data diatas dapat dilihat masih belum memadai sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dikecamatan mempura. Berdasarkan pengamatan peneliti masih banyaknya arsip-arsip pemerintahan desa yang tidak tertata rapi bahkan sudah dalam kondisi tidak baik lagi, dan masih banyak arsip-arsip yang ditumpukkan disamping filling kabinet”.

2. Fasilitasi penyusunan peraturan desa

Kemudian untuk mengetahui jawaban Responden mengenai fasilitasi penyusunan peraturan desa yang diberikan terhadap penyelenggara pemerintah desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.28: Jawaban responden terhadap Fasilitas Penyusunan Peraturan Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	16	31,4%
2.	Kadang-kadang	23	45,1%
3.	Tidak ada	12	23,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Fasilitas yang dilakukan oleh Camat Mempura Kabupaten Siak terhadap Penyusunan Peraturan Pemerintah Desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 16 orang atau (31,4%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 23 orang atau (45,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 12 orang (23,5%).

Dari hasil tanggapan responden tersebut menyatakan bahwa mayoritas responden mengatakan kadang-kadang yaitu sebanyak 23 orang atau (45,1%). Berdasarkan Wawancara kepada sekretaris desa Benteng Hilir pada hari Senin 20/02/2012 jam 09.09 “bahwa dalam penyusunan peraturan desa pemerintahan desa masih mengacu pada peraturan desa sebelumnya, tidak ada pedoman ataupun buku tata cara penyusunan peraturan desa yang diberikan”.

3. Fasilitas Kepala Desa

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan Responden mengenai Fasilitas yang dilakukan pemerintah kecamatan terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang diharapkan bisa mempermudah dan membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengetahui tanggapan responden tentang hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.29: Jawaban responden terhadap Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	21	41,2%
2.	Kadang-kadang	20	39,2%
3.	Tidak ada	10	19,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dilakukan oleh Camat Mempura diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 21 orang atau (41,2%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 20 orang atau (39,2%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 10 orang (19,6%).

Dari hasil tanggapan responden tersebut menyatakan bahwa mayoritas responden mengatakan Ya yaitu sebanyak 23 orang atau (41,2%). Responden yang menyatakan jawaban tersebut beralasan bahwa sudah adanya peningkatan-peningkatan terhadap fasilitas tugas kepala desa. Berdasarkan Wawancara kepada Kepala Desa Paluh pada hari Selasa 14/02/2012 jam 09.20 wib “ia menyatakan bahwa sudah adanya upaya-upaya meningkatkan fasilitas tugas kepala desa dengan memberikan motor dinas yang untuk memudahkan dan sangat membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas”.

4. Fasilitas kerjasama antar desa

Dengan adanya kerjasama antar unit pemerintahan desa ini setidaknya bisa mengembangkan kuitas sumber daya manusianya karena sangat besar

pengalaman yang bisa didapat. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Fasilitas yang dilakukan pihak Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.30: Jawaban responden terhadap Fasilitas kerjasama antar desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	19	37,3%
2.	Kadang-kadang	20	39,2%
3.	Tidak ada	12	23,5%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dilakukan oleh Camat Mempura diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 19 orang atau (37,3%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 20 orang atau (39,2%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 12 orang (23,5%), dan mayoritas responden menyatakan “kadang-kadang”.

Bedasarkan Wawancara kepada Camat pada hari Selasa 07/02/2012 jam 10.52 wib “ia menyatakan bahwa masih sulitnya mengumpulkan kepala desa dan masih terhalangnya oleh keterbatasan sarana dan prasarana semacam ruangan untuk melakukan pertemuan-pertemuan”. Alasan responden menyatakan Kadang-kadang karena sejauh ini masih jarang pertemuan-pertemuan dalam rangka kerjasama antar desa, padahal kerjasama antar desa bisa lebih mengarahkan kepada pencapaian tujuan otonomi desa dengan kerjasama antar desa diharapkan bisa saling membantu dan bertukar pikiran satu dengan yang lain dengan kerjasama juga bisa cepatnya terwujud tujuan otonomi daerah tersebut karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan.

5. Fasilitas ketentraman dan ketertiban

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan Responden mengenai Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel V.31: Jawaban responden terhadap Fasilitas ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Ya	19	37,3%
2.	Kadang-kadang	23	45,1%
3.	Tidak ada	9	17,6%
Jumlah		51	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dilakukan oleh Camat Mempura diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 19 orang atau (37,3%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 23 orang atau (45,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 9 orang (17,6%).

Dari hasil tanggapan responden tersebut menyatakan bahwa mayoritas responden mengatakan kadang-kadang yaitu sebanyak 23 orang atau (45,1%). Responden yang menyatakan jawaban tersebut beralasan bahwa masih minimnya fasilitas terhadap ketentraman dan ketertiban karena tidak adanya jadwal ronda bagi masyarakat dan masih sedikitnya poskamling-poskamling yang ada demi meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk mengetahui fasilitas yang ada untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum berupa poskamling-poskamling yang telah ada didirikan di setiap masing-masing desa di Kecamatan Mempura sejauh ini dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.32 : Upaya menjaga ketertiban dan keamanan

No	Desa	Poskamling	Keterangan
1.	Koto Ringin	3	1 tidak memadai
2.	Paluh	2	Tidak memadai
3.	Benteng Hilir	2	1 Tidak memadai
4.	Benteng Hulu	3	Tidak memadai
5.	Kp.Tengah	2	Tidak memadai
6.	Sei. Mempura	4	2 Tidak memadai
7.	Merempan Hilir	3	2 Tidak memadai
8.	Teluk Merempan	2	Tidak memadai

Sumber: Data Kecamatan Mempura, 2012

Bedasarkan tabel diatas diketahui bahwa masih banyak poskamling yang tidak beroperasi dan tidak memadai lagi atau banyak poskamling yang rusak, terkadang tidak jarang juga poskamling digunakan untuk tempat duduk-duduk yang mana sedikit demi sedikit membuat kerusakan dan pada akhirnya poskamling dalam keadaan tidak bagus lagi. Sejauh ini poskaling memang jarang beroperasi, kebanyakan jika sudah ada kemalingan baru membuat jadwal penjagaan poskamling untuk beroperasi. Padahal seharusnya poskamling harus beroperasi demi menjaga ketertiban dan ketentraman umum.

Demikianlah tanggapan responden mengenai sub-sub indikator dari Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak yang diperoleh dari responden berdasarkan penyebaran Quisioner penelitian.

Untuk mengetahui rekapitulasi masing-masing indikator dari Peranan Camat dalam Membina Administrasi pemerintahan desa dikecamatan mempura kabupaten siak dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

5.3. Rekapitulasi jawaban responden Dalam Setiap Indikator Variabel

Bedasarkan tanggapan responden tentang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak berdasarkan masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi berikut ini:

1. Mengenai Bimbingan

Tabel V.33: Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Bimbingan pada pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban		
		B	CB	KB
1.	Memberikan petunjuk	19	17	16
2.	Memberikan pengarahan	22	20	9
3.	Adanya pelatihan	14	27	10
4.	Adanya Rapat kerja	12	26	13
5.	Melakukan Evaluasi	11	30	10
Skor		77 (3)	120 (2)	58 (1)
Jumlah		231	240	58
Jumlah Skor		529		
Interval Skor		425-594 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari indikator Bimbingan dalam Pembinaan terhadap Administrasi Pemerintahan Desa dengan 5 (lima) sub indikator mendapat tanggapan responden yang telah ditetapkan bahwa yang menyatakan baik berjumlah 231, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 240, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 58.

Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Bimbingan dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura kabupaten Siak mendapat jumlah skor 529 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

2. Mengenai Supervisi

Tabel V.34: Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Supervisi pada pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban		
		B	CB	KB
1.	Pengawasan Langsung	8	22	21
2.	Pengawasan Tidak Langsung	19	23	9
3.	Pengawasan Kepala Desa	18	26	7
4.	Pengawasan Aparat Desa	11	22	18
5.	Pengawasan Tertib Administrasi	10	27	14
Skor		66 (3)	120 (2)	69 (1)
Jumlah		198	240	69
Jumlah Skor		507		
Interval Skor		425-594 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari indikator Supervisi dengan 5 (lima) sub indikator yang diteliti yaitu dengan mengadakan pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan terhadap kinerja kepala desa, pengawasan terhadap kinerja aparat desa dan pengawasan terhadap tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Dengan sub indikator tersebut diperoleh tanggapan responden yang menyatakan baik berjumlah 198, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 240, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 69.

Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Supervisi dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura kabupaten Siak mendapat jumlah skor 507 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

3. Mengenai Konsultasi

Tabel V.35 Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Konsultasi pada pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban		
		B	CB	KB
1.	Memberikan masukan	16	26	9
2.	Menerima keluhan	17	24	10
3.	Memberikan penjelasan	18	25	8
4.	Menjalin komunikasi	15	27	9
5.	Memberikan solusi	26	17	8
Skor		92 (3)	119 (2)	44 (1)
Jumlah		276	238	44
Jumlah Skor		558		
Interval Skor		425-594 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 5 (lima) sub indikator yang diteliti dari indikator Konsultasi yaitu memberikan masukan-masukan, menerima keluhan-keluhan, memberikan penjelasan, menjalin komunikasi yang baik, memberikan solusi-solusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini memperoleh tanggapan dari responden yang menyatakan baik berjumlah 276, kemudian responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 238, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 44.

Bedasarkan indikator Konsultasi dengan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Konsultasi dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak mendapat jumlah skor 558 dan yang mana dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

4. Pemberian Pedoman

Tabel V.36: Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Pemberian Pedoman pada pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban		
		B	CB	KB
1.	Memberikan petunjuk teknis	20	22	9
2.	Memberikan Buku-buku	18	27	6
3.	Menjelaskan pedoman	18	24	9
4.	Mamfaat pedoman	15	24	12
5.	Mendatangkan tanaga ahli	17	25	9
Skor		88 (3)	122 (2)	45 (1)
Jumlah		264	244	45
Jumlah Skor		553		
Interval Skor		425-594 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 5 sub indikator yang diteliti dari indikator Pemberian Pedoman yaitu gengan memberikan petunjuk teknis, memberikan buku-buku, menjelaskan pedoman yang diberikan, mamfaat pedoman yang didapat dan mendatangkan tenaga ahli dalam menjelaskan pedoman yang diberikan. Dari sub indikator tersebut didapat tanggapan responden yang menyatakan baik berjumlah 264, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 244, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 45.

Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, dari indikator pemberian pedoman, maka dapat diketahui bahwa indikator Pemberian Pedoman dalam Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura kabupaten Siak mendapat jumlah skor 553 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

5. Mengenai Fasilitas

Tabel V.37: Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Fasilitas pada pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban		
		B	CB	KB
1.	Fasilitas tata administrasi	16	23	12
2.	Fasilitas penyusunan peraturan desa	15	27	9
3.	Fasilitas kepala desa	21	20	10
4.	Fasilitas Kerjasama antar desa	19	20	12
5.	Fasilitas ketentraman dan ketertiban	19	23	9
Skor		91 (3)	112 (2)	52 (1)
Jumlah		273	224	52
Jumlah Skor		549		
Interval Skor		425-594 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 5 sub indikator yang diteliti dari indikator Fasilitas yaitu fasilitas tata administrasi, fasilitas penyusunan peraturan desa, fasilitas kepala desa, fasilitas kerjasama antar desa, fasilitas ketentraman dan ketertiban. Dari sub indikator tersebut Memproleh tanggapan dari responden bahwasannya yang menyatakan baik berjumlah 273, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 224, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 52.

Berdasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas maka dapat diketahui bahwa hasil penghitungan dari indikator Fasilitas dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak mendapat jawaban dengan jumlah skor keseluruhan 549 dan yang mana dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

Kemudian untuk mengetahui secara keseluruhan hasil analisis Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel V.38 Rekapitulasi Jawaban Responden Seluruh indikator tentang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban		
		B	CB	KB
1.	Bimbingan	231	240	58
2.	Supervisi	240	222	64
3.	Konsultasi	276	238	44
4.	Pemberian Pedoman	264	244	45
5.	Fasilitasi	273	244	52
Skor		1284	1168	263
Jumlah Skor : Jumlah Sub Indikator		2715 : 5		
Jumlah Skor Rata-Rata		543		
Interval Skor		425-594 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 5 indikator yang diteliti yaitu Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Pemberian Pedoman, dan fasilitasi dengan 51 orang responden diperoleh tanggapan responden yang menyatakan baik dengan skor 1284, kemudian responden yang menyatakan Cukup Baik skornya 1168, dan yang menyatakan Kurang Baik skornya 263.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat diketahui bahwa Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak mendapatkan jumlah skor rata-rata 543 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Sebagai hasil penelitian penulis dengan judul Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 126 ayat (1) berbunyi: Kecamatan dipimpin oleh Camat yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Administrasi Pemerintahan Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepala desa untuk mencapai tujuannya itu pemerintah desa mampu mengerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Dari hasil penelitian dapat diketahui Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa belum maksimal menurut tanggapan responden, ini dapat diketahui beberapa tabel dalam bab V.

Adapun pembinaan administrasi pemerintahan desa dikecamatan Mempura Kabupaten Siak dapat dilihat berdasarkan PP No. 19 Tahun 2009 PP No. 19 Tahun 2008 Pasal 21 Tentang Kecamatan, dengan indikator sebagai berikut:

a. Bimbingan

Bimbingan yang diukur dengan 5 sub indikator penelitian yaitu Memberikan petunjuk, Memberikan pengarahan, Adanya pelatihan, Adanya Rapat kerja, Melakukan Evaluasi.

Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Bimbingan dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura kabupaten Siak mendapat jumlah skor 529 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

b. Supervisi

Supervisi yang diukur dengan 5 sub indikator penelitian yaitu Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung, Pengawasan Kinerja Kepala Desa, Pengawasan Kinerja Aparatur Desa, Pengawasan Tertib Administrasi.

Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Supervisi dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura kabupaten Siak mendapat jumlah skor 507 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

c. Konsultasi

Konsultasi yang diukur dengan 5 sub indikator penelitian yaitu Pemberian Masukan, Menerima Keluhan, Menerima Penjelasan, Menjalin Komunikasi, Memberikan Solusi.

Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Konsultasi dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di

Kecamatan Mempura kabupaten Siak mendapat jumlah skor 558 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

d. Pemberian Pedoman

Pemberian Pedoman diukur dengan 5 sub indikator penelitian yaitu memberikan petunjuk teknis, memberikan buku-buku, menjelaskan pedoman yang diberikan, manfaat pedoman, mendatangkan tenaga ahli.

Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Pemberian Pedoman dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura kabupaten Siak mendapat jumlah skor 553 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

e. Fasilitasi

Fasilitasi diukur dengan 5 sub indikator penelitian yaitu fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa, fasilitasi penyusunan peraturan desa, fasilitasi kepala desa, fasilitasi kerjasama antar desa, fasilitasi ketentraman dan ketertiban.

Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indicator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Fasilitasi dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura kabupaten Siak mendapat jumlah skor 549 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

Demikianlah secara umum dapat diketahui bahwa Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak mendapat skor rata-rata 543 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

6.2. Saran

Ada beberapa ditemukan hal-hal penting agar pembinaan lebih baik lagi.

Untuk itu peneliti mengajukan beberapa saran berikut:

- a. Sebaiknya lebih sering mengadakan Rapat kerja agar bisa mengetahui lebih jauh kinerja apataur desa dan memberikan bimbingan/pelatihan seharusnya mempunyai perencanaan yang matang dan memerhatikan pelatihan yang dibutuhkan oleh Pemerintahan Desa.
- b. Sebaiknya lebih sering datang ke kantor desa untuk melakukan pengawasan dan tinjauan-tinjauan kedesa-desa sehingga program pembinaan yang pernah diberikan bermamfaat, berjalan lancar dan penataan administrasi desa bisa tertib.
- c. Menjalin komunikasi yang Baik agar jika ada kesulitan kerja Pemerintah Desa bisa langsung berkonsultasi.
- d. Menjelaskan pedoman yang diberikan terlebih dahulu, karena mengingat tingkat pendidikan, masa kerja yang mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.
- e. Diharapkan memperhatikan kebutuhan dari segi sarana dan prasaranan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintah desa.
- f. Dan kepada Pemerintahan Desa juga diharapkan untuk meningkatkan Disiplin, agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan program pembinaan yang sedikit banyaknya sudah diberi bermamfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Ismail, Maimunah. 2001. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Jakarta; Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Indonesia.
- Kusnadi. 2005. *Pengantar Manajemen*. Malang; Unibraw Press.
- Kansil, C. ST. 2004. *Pemerintahan Daerah Diindonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta; Rineka Cipta.
- , 2001. *Dimensi-dimensi Pemerintahan daerah*, Jakarta; Rineka Cipta.
- , 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Nurholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Riwu. Kaho Josef. 2005, *Prosfek Otonomi Daerah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Salam, Dharma Satyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta; Djambatan, Edisi Revisi.
- Saydam, Gozali. 2000. *Manajemen Sumber Daya Alam*. Jakarta; Djambatan.
- Sedarmaryati. 2004, *good Governance (Pemerintahan yang baik)*. Bandung; Bandar Maju.
- Singarimbu, Masri. 2006. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta; LP3S
- Soekanto, Soeryono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung; Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. DKI Jakarta; Buku
Obor.

Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan birokrasi pemerintahan*.
Yogyakarta; Graha Ilmu.

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta; PT.
Raja Grafindo Persada.

-----, 2005. *Penyeleenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta; PT. Raja
Grafindo Persada.

-----, 2002. *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Jakarta; PT. Raja
Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang
Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 09 tahun 2006 tentang Tatacara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa,